



UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)

MODUL AJAR

Berbasis Outcome-Based Education

Pendidikan Karakter Bangsa

Kode 2CKUI304 · 2 sks · Semester 1

Kurikulum 2023 · Mata Kuliah Wajib Penciri Institusi

Penyusun

Purwanto, S.IP., M.Si.

Ariandi Saputra, S.Pd., M.AP.

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO · 2025

SEMESTER

01

IDENTITAS MODUL

Judul Modul	Modul Ajar Pendidikan Karakter Bangsa
Mata Kuliah	Pendidikan Karakter Bangsa
Kode Mata Kuliah	2CKUI304
Rumpun Mata Kuliah	MKWP (Mata Kuliah Wajib Penciri Institusi)
Bobot	2 sks
Semester	1 (satu)
Mata Kuliah Prasyarat	Tidak ada
Program Studi	Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	Universitas Ichsan Gorontalo
Kurikulum	Kurikulum 2023 berbasis Outcome-Based Education (OBE)
Dokumen Acuan	RPS-2CKUI304 Pendidikan Karakter Bangsa
Penyusun	Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601 Ariandi Saputra, S.Pd., M.AP. (NIDN 1602058701)
Penelaah	
Versi / Tahun	1.0 / 2025

Hak Penggunaan

Modul ini merupakan bahan ajar internal Universitas Ichsan Gorontalo. Penggandaan untuk kepentingan perkuliahan diperkenankan dengan tetap mencantumkan sumber.

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Ajar **Pendidikan Karakter Bangsa** (2CKUI304) telah ditelaah dan disahkan sebagai bahan ajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo.

Disusun oleh, Penyusun

Ditelaah oleh, Koordinator RMK

Purwanto, S.IP., M.Si.

NIDN. 0926096601

.....

NIDN.

Disetujui oleh, Ketua Program Studi

Mengetahui, Dekan FISIP

.....

NIDN.

.....

NIDN.

Gorontalo, ... 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Ajar **Pendidikan Karakter Bangsa** ini dapat diselesaikan. Modul ini disusun sebagai bahan belajar utama mata kuliah wajib penciri institusi Universitas Ichsan Gorontalo, dan merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berkode 2CKUI304 dalam Kurikulum 2023 yang dikembangkan dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE).

Karakter bangsa tidak cukup dihafalkan; ia harus dipahami, diuji dalam kasus nyata, dan akhirnya diwujudkan dalam tindakan. Karena itu, modul ini membawa mahasiswa bergerak bertahap: dari memahami nilai-nilai Pancasila, integritas kebangsaan, etika pemerintahan, dan prinsip antikorupsi; menuju menganalisis kasus pelanggaran integritas dan degradasi nilai, khususnya di Kawasan Timur Indonesia; hingga merancang Rencana Aksi Karakter bagi komunitas nyata dan merefleksikannya dalam esai ilmiah.

Setiap unit diturunkan dari satu Sub-CPMK dan dilengkapi pemantik, uraian materi, studi kasus, aktivitas pembelajaran, latihan, serta umpan balik untuk mengukur tingkat penguasaan secara mandiri. Nilai dasar ICHSA-N, yaitu *Integrity, Creativity, Harmony, Service, Adaptability*, dan *Nationalism*, tidak ditempatkan sebagai hiasan, melainkan sebagai kriteria yang dinilai dalam setiap tugas.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan rekan dosen atas dukungannya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan modul pada edisi berikutnya.

Gorontalo, 2025
Penyusun,

Purwanto, S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI

Identitas Modul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah	1
1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah	1
1.3 Capaian Pembelajaran	2
1.4 Matriks Keterkaitan dan Peta Unit Modul	3
1.5 Peta Alur Belajar	4
1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Akhir	5
1.7 Sistem Penilaian	6
1.8 Ketuntasan Belajar dan Tindak Lanjut	6
BAB II Pancasila sebagai Dasar Karakter Bangsa	8
BAB III Integritas Kebangsaan dan Identitas Nasional	14
BAB IV Etika Pemerintahan dan Good Governance	20
BAB V Antikorupsi dan Perilaku Koruptif	26
BAB VI Rencana Aksi Karakter Berbasis Komunitas	32
BAB VII Esai Ilmiah Reflektif-Argumentatif	38
BAB VIII Presentasi Kolaboratif dan Penyempurnaan Proposal	44
BAB IX ASESMEN SUMATIF DAN INTEGRASI PENILAIAN	49
9.1 Prinsip Asesmen	49
9.2 Peta Komponen Penilaian dan Sub-CPMK	49
9.3 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UTS	50
9.4 Ketentuan dan Kisi-Kisi UAS	52
9.5 Rubrik Penilaian Komponen	52
9.6 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan	54
Glosarium	55
Daftar Pustaka	57
Lampiran	58
Lampiran 1 Formulir Topik Proyek Akhir	58
Lampiran 2 Lembar Peta Nilai	59
Lampiran 3 Templat Laporan Analisis Kritis	60
Lampiran 4 Templat Rencana Aksi Karakter (9 Komponen)	61
Lampiran 5 Logbook Kontribusi Mingguan	62
Lampiran 6 Lembar Peer Review Esai	63
Lampiran 7 Lembar Penilaian Sejawat Presentasi	64
Lampiran 8 Lembar Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan GenAI	65
Lampiran 9 Kuesioner Umpan Balik Mahasiswa terhadap Modul	66

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul ini dirancang untuk dipelajari secara bertahap, satu unit untuk setiap Sub-CPMK. Ikuti petunjuk berikut agar proses belajar terarah pada capaian pembelajaran yang ditetapkan.

A. Petunjuk bagi Mahasiswa

1. Pelajari **Bab I** terlebih dahulu untuk memahami capaian pembelajaran, peta alur belajar, proyek akhir, dan sistem penilaian.
2. Pelajari unit secara berurutan. Nilai-nilai yang dipahami pada unit awal menjadi dasar analisis kasus dan perancangan rencana aksi pada unit berikutnya.
3. Di awal setiap unit, baca label **Sub-CPMK, CPL, dan bobot** di bawah judul unit serta indikator capaiannya.
4. Tanggapi **pemantik** sebelum membaca uraian materi, lalu bandingkan jawaban awal dengan pemahaman setelah belajar.
5. Kerjakan **aktivitas pembelajaran**, baik di kelas (luring) maupun melalui LMS (daring).
6. Kerjakan **latihan** secara jujur tanpa melihat kunci jawaban, lalu hitung tingkat penguasaan Anda (Subbab 1.8).
7. Lanjutkan ke unit berikutnya apabila tingkat penguasaan mencapai **70% atau lebih**; jika belum, kerjakan remedial.
8. Isi **refleksi diri** di akhir setiap unit sebagai bahan esai ilmiah reflektif pada Unit 6.

B. Petunjuk bagi Dosen Pengampu

1. Gunakan modul ini bersama RPS-2CKUI304 sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan.
2. Sampaikan Sub-CPMK, indikator, dan kriteria penilaian kepada mahasiswa di awal setiap unit.
3. Fasilitasi *Case-Based Learning* dan *Project-Based Learning*; dampingi kelompok sejak pemilihan komunitas hingga sidang karakter.
4. Gunakan rubrik pada unit terkait dan Bab Asesmen Sumatif secara konsisten; libatkan reviewer tamu dari praktisi pemerintahan atau tokoh masyarakat lokal pada presentasi akhir.
5. Catat nilai per Sub-CPMK di SI-OBE sebagai dasar evaluasi ketercapaian CPL dan perbaikan pembelajaran.

C. Etika Akademik dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif (GenAI)

Mata kuliah ini menjadikan kejujuran sebagai bahan ajar sekaligus aturan main. GenAI boleh dimanfaatkan sebagai asisten belajar dengan ketentuan berikut.

- **Diperbolehkan:** eksplorasi konsep, bantuan penyusunan kerangka tulisan, pemeriksaan tata bahasa, dan pembangkitan ide awal yang kemudian dikembangkan sendiri.
- **Dilarang:** menyerahkan luaran GenAI sebagai karya sendiri, memakai GenAI saat kuis, UTS, atau UAS kecuali diizinkan, dan mengutip sumber hasil GenAI tanpa verifikasi.
- **Wajib:** mencantumkan sitasi penggunaan GenAI yang memuat (a) alat, (b) bagian yang dibantu, (c) *prompt*, (d) modifikasi mandiri, dan (e) refleksi.

- **Khusus esai ilmiah:** esai adalah refleksi personal; kemiripan teks lebih dari 20% antaranggota kelompok dinyatakan tidak lulus komponen esai.

D. Penanda dalam Modul

Modul ini menggunakan label dan kotak berwarna untuk membedakan fungsi setiap bagian.

Label Sub-CPMK, CPL, bobot	Label di bawah judul unit yang menunjukkan jejak OBE unit tersebut.
Sub-CPMK & Indikator	Kemampuan akhir yang dituju unit dan bukti capaiannya.
Pemantik	Pertanyaan pembuka untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan diskusi.
Studi Kasus	Kasus integritas, tata kelola, dan kebangsaan untuk latihan analisis.
Aktivitas	Langkah kerja individu atau kelompok, luring maupun daring.
Latihan & Umpan Balik	Soal atau tugas formatif beserta kunci atau rubrik.
Refleksi	Pertanyaan untuk merenungkan proses dan capaian belajar.
Nilai ICHSA-N	Penguatan nilai dasar Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB I

PENDAHULUAN

Orientasi mata kuliah, capaian pembelajaran, alur belajar, dan sistem penilaian

■ 1.1 Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah **Pendidikan Karakter Bangsa** (2 sks) merupakan mata kuliah wajib penciri institusi UNISAN yang membekali mahasiswa dengan fondasi nilai Pancasila, integritas kebangsaan, etika pemerintahan, dan prinsip antikorupsi sebagai landasan sikap dan perilaku profesional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era kontemporer.

Mata kuliah ini menjembatani domain sikap (CPL-01) dan domain inovasi beretika (CPL-10). Mahasiswa tidak hanya menjelaskan konsep nilai kebangsaan, tetapi juga menganalisis kasus pelanggaran integritas dan degradasi nilai, khususnya di lingkungan pemerintahan dan masyarakat Kawasan Timur Indonesia (KTI), menggunakan pendekatan etika Pancasila dan prinsip tanggung jawab individual maupun kolektif. Pembelajaran bergerak dari penguatan konseptual, analisis kasus nyata, hingga perancangan inisiatif pelayanan publik atau program kewirausahaan sosial berbasis nilai karakter bangsa yang dituangkan dalam Rencana Aksi Karakter (RAK) dan dipresentasikan secara kolaboratif.

■ 1.2 Relevansi dan Posisi Mata Kuliah

Sebagai mata kuliah semester pertama, Pendidikan Karakter Bangsa menjadi fondasi sikap bagi seluruh mata kuliah berikutnya. Calon lulusan Ilmu Pemerintahan kelak akan bekerja sebagai aparatur, analis kebijakan, penyelenggara pemilu, atau pegiat masyarakat sipil, bidang-bidang yang sangat rentan terhadap godaan penyalahgunaan wewenang. Karakter yang kuat adalah pertahanan pertama.

Relevansinya bagi mahasiswa UNISAN terletak pada pembentukan karakter pemimpin dan inovator lokal yang mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat KTI dengan menjunjung nilai ICHSA-N sebagai identitas institusi.

Tabel 1.1 Integrasi nilai ICHSA-N dalam mata kuliah

Nilai	Wujud dalam pembelajaran dan penilaian
Integrity	Penerapan prinsip antikorupsi dan tanggung jawab profesional dalam studi kasus pemerintahan; kejujuran akademik dalam setiap tugas.
Creativity	Perancangan inisiatif pelayanan publik atau kewirausahaan sosial yang inovatif dan kontekstual dalam RAK.
Harmony	Kolaborasi lintas perspektif dan daerah asal dalam diskusi kasus degradasi nilai kebangsaan.
Service	Orientasi RAK pada kontribusi nyata bagi komunitas di KTI.
Adaptability	Penyesuaian rancangan terhadap tantangan era digital, kondisi lokal, dan umpan balik.

Nilai	Wujud dalam pembelajaran dan penilaian
Nationalism	Penghayatan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai landasan setiap keputusan etis dan inovatif.

■ 1.3 Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran disusun berjenjang: CPL Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah dijabarkan menjadi CPMK, lalu dirinci menjadi Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir pada setiap tahap belajar. Setiap Sub-CPMK menjadi dasar satu unit dalam modul ini.

1.3.1 CPL Program Studi yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Tabel 1.2 CPL yang dibebankan

Kode	Rumusan CPL
CPL-01	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, menjunjung Pancasila dan nilai kebangsaan, menaati etika pemerintahan dan prinsip antikorupsi, serta bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun dalam tim.
CPL-10	Mampu mengembangkan inovasi pelayanan publik serta usaha dan layanan berbasis teknologi (<i>technopreneurship</i>) secara beretika, kreatif, kolaboratif, dan adaptif, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan daya saing bangsa (penciri UNISAN).

1.3.2 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tabel 1.3 Rumusan CPMK

Kode	Rumusan CPMK
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila, integritas kebangsaan, etika pemerintahan, dan prinsip antikorupsi sebagai fondasi karakter bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di era kontemporer.
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis kasus pelanggaran integritas, korupsi, dan degradasi nilai kebangsaan di lingkungan pemerintahan dan masyarakat—khususnya di Kawasan Timur Indonesia—menggunakan pendekatan etika Pancasila dan prinsip tanggung jawab individual maupun kolektif.
CPMK3	Mahasiswa mampu merancang inisiatif pelayanan publik atau program <i>technopreneurship</i> berbasis nilai karakter bangsa (integritas, religiusitas, nasionalisme, dan adaptabilitas) yang kreatif, beretika, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat lokal UNISAN/Kawasan Timur Indonesia, dalam bentuk proposal tertulis yang dipresentasikan secara kolaboratif.

1.3.3 Kemampuan Akhir Tiap Tahap Belajar (Sub-CPMK)

Tabel 1.4 Rumusan Sub-CPMK

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Minggu
Sub-CPMK1	Mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis karakter bangsa dan mengaitkannya dengan realitas kehidupan berbangsa di era kontemporer melalui analisis kasus nyata.	CPMK1	1–2
Sub-CPMK2	Menjelaskan konsep integritas kebangsaan dan identitas nasional serta membandingkan ekspresi kebangsaan pada berbagai konteks budaya lokal Kawasan Timur Indonesia.	CPMK1	3–4

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Minggu
Sub-CPMK3	Menganalisis prinsip-prinsip etika pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan mengevaluasi penerapannya pada kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.	CPMK2	5–6
Sub-CPMK4	Menjelaskan prinsip antikorupsi dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku koruptif di lingkungan pemerintahan dan akademik melalui studi kasus berbasis <i>Project-Based Learning</i> .	CPMK2	7
Sub-CPMK5	Merancang strategi penerapan nilai-nilai integritas, antikorupsi, dan etika pemerintahan dalam konteks pelayanan publik lokal melalui penyusunan rencana aksi karakter berbasis komunitas.	CPMK3	9–10
Sub-CPMK6	Mengintegrasikan seluruh nilai karakter bangsa (Pancasila, integritas kebangsaan, etika pemerintahan, dan antikorupsi) ke dalam produk reflektif-argumentatif berupa esai ilmiah dan presentasi akhir yang menunjukkan internalisasi nilai ICHSA-N.	CPMK3	11–13
Sub-CPMK7	Mempresentasikan dan mempertahankan proposal inisiatif berbasis karakter bangsa secara kolaboratif di hadapan audiens dengan mengintegrasikan umpan balik untuk penyempurnaan akhir.	CPMK3	14–15

■ 1.4 Matriks Keterkaitan dan Peta Unit Modul

Matriks berikut menunjukkan keselarasan konstruktif antara Sub-CPMK, CPMK, dan CPL. Bobot pada Tabel 1.6 menjadi acuan tunggal pengukuran ketercapaian CPL.

Tabel 1.5 Korelasi Sub-CPMK terhadap CPMK

Sub-CPMK	CPMK1	CPMK2	CPMK3
Sub-CPMK1	✓	—	—
Sub-CPMK2	✓	—	—
Sub-CPMK3	—	✓	—
Sub-CPMK4	—	✓	—
Sub-CPMK5	—	—	✓
Sub-CPMK6	—	—	✓
Sub-CPMK7	—	—	✓

Tabel 1.6 Korelasi Sub-CPMK terhadap CPL dan bobot (%)

Sub-CPMK	CPL-01	CPL-10	Bobot	Jumlah minggu
Sub-CPMK1	15	—	15	2
Sub-CPMK2	14	—	14	2
Sub-CPMK3	14	—	14	2
Sub-CPMK4	7	—	7	1
Sub-CPMK5	7	7	14	2
Sub-CPMK6	11	11	22	3
Sub-CPMK7	7	7	14	2
Jumlah	75	25	100	14

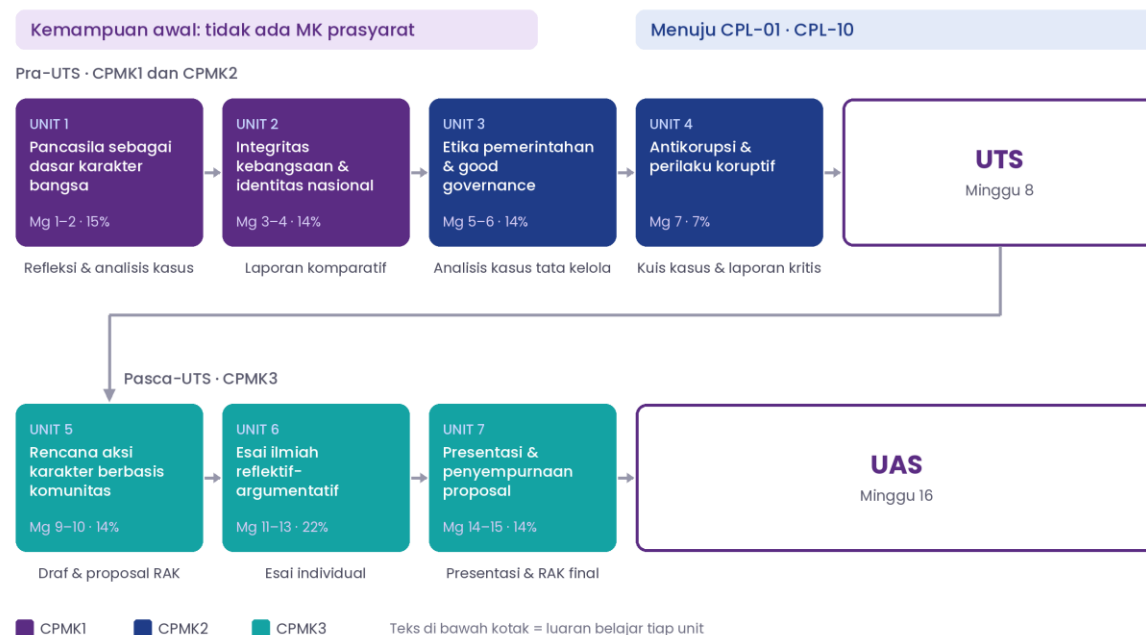
Tabel 1.7 Peta unit modul

Unit	Judul Unit	Sub-CPMK	Minggu	Luaran Belajar
1	Pancasila sebagai Dasar Karakter Bangsa	Sub-CPMK1	1–2	Refleksi dan analisis kasus Pancasila
2	Integritas Kebangsaan dan Identitas Nasional	Sub-CPMK2	3–4	Laporan komparatif ekspresi kebangsaan
3	Etika Pemerintahan dan Good Governance	Sub-CPMK3	5–6	Analisis kasus tata kelola daerah
4	Antikorupsi dan Perilaku Koruptif	Sub-CPMK4	7	Kuis kasus dan Laporan Analisis Kritis
—	Evaluasi Tengah Semester (UTS)	Sub-CPMK1–4	8	—
5	Rencana Aksi Karakter Berbasis Komunitas	Sub-CPMK5	9–10	Draf dan proposal RAK
6	Esai Ilmiah Reflektif-Argumentatif	Sub-CPMK6	11–13	Esai ilmiah individual
7	Presentasi Kolaboratif dan Penyempurnaan Proposal	Sub-CPMK7	14–15	Presentasi dan RAK final
—	Evaluasi Akhir Semester (UAS)	Sub-CPMK5–7	16	—

■ 1.5 Peta Alur Belajar

Paruh pertama semester membangun pemahaman dan kepekaan: nilai Pancasila, identitas kebangsaan, etika pemerintahan, dan antikorupsi, yang langsung diuji pada kasus nyata. Paruh kedua

mengubah pemahaman itu menjadi tindakan: merancang Rencana Aksi Karakter untuk komunitas nyata di KTI, merefleksikannya dalam esai ilmiah, lalu mempertahankannya di hadapan audiens.



Gambar 1.1 Peta alur belajar dan luaran tiap unit

■ 1.6 Strategi Pembelajaran dan Proyek Akhir

1.6.1 Model, Metode, dan Modalitas

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan *Case-Based Learning* untuk menganalisis kasus nyata dan *Project-Based Learning* untuk merancang Rencana Aksi Karakter. Teknik yang digunakan antara lain diskusi berbasis berita, *think-pair-share*, diskusi panel lintas daerah, presentasi, *peer review*, simulasi *pitching*, dan sidang karakter. Perkuliahan dilaksanakan secara bauran (*blended learning*) melalui kelas tatap muka dan LMS UNISAN.

Tabel 1.8 Estimasi beban belajar per minggu (2 sks)

Bentuk Kegiatan	Rincian	Waktu
Kegiatan Belajar Terbimbing (PB)	Tatap muka atau sinkron: 2 × 50 menit	100 menit
Penugasan Terstruktur (PT)	Tugas individu atau kelompok: 2 × 60 menit	120 menit
Kegiatan Mandiri (KM)	Membaca, menelusuri kasus, refleksi: 2 × 60 menit	120 menit
Jumlah		340 menit

1.6.2 Proyek Akhir: Rencana Aksi Karakter Berbasis Komunitas

Mahasiswa bekerja dalam kelompok 3–4 orang, diutamakan lintas program studi dan daerah asal, untuk memilih satu komunitas atau lembaga nyata di KTI (desa, kelurahan, sekolah, puskesmas, atau kantor pelayanan publik). Kelompok menganalisis masalah karakter, integritas, dan tata kelola di komunitas tersebut, lalu merancang **Rencana Aksi Karakter (RAK)**. Setiap anggota menulis **esai**

ilmiah individual yang merefleksikan kontribusinya dan internalisasi nilai ICHSA-N. Produk akhir dipresentasikan dan dipertahankan dalam **sidang karakter** di hadapan dosen dan reviewer tamu.

Tabel 1.9 Tahapan dan luaran proyek akhir

Minggu	Tahap dan luaran
1–2	Orientasi, pembentukan kelompok, pemilihan komunitas KTI; Formulir Topik
3–5	Kajian nilai Pancasila dan identitas kebangsaan komunitas; Lembar Peta Nilai (akhir Minggu 5)
6–8	Analisis <i>good governance</i> dan pemetaan risiko koruptif; Laporan Analisis Kritis (akhir Minggu 8)
9–11	Penyusunan draf RAK 9 komponen dan presentasi rancangan; konsultasi draf (Minggu 11)
11–13	Penulisan, <i>peer review</i> , dan presentasi esai ilmiah individual ; revisi RAK
14	Presentasi kolaboratif dan simulasi <i>pitching</i> ; catatan revisi
15	Sidang karakter; pengumpulan RAK final , esai final, logbook, dan rekaman video

Ketentuan proyek

Komunitas wajib berada di KTI (Sulawesi, Maluku, Papua, atau NTT/NTB); komunitas di luar KTI memerlukan persetujuan tertulis dosen sebelum akhir Minggu 2. Kontribusi individu dibuktikan melalui logbook mingguan; anggota yang tidak tercantum pada logbook tiga minggu berturut-turut dapat dikenai pengurangan 10 poin nilai RAK. Keterlambatan tagihan dikenai penalti 5 poin per hari, maksimal 3 hari.

1.7 Sistem Penilaian

Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif. Nilai akhir ditentukan oleh komponen dan bobot berikut, sedangkan ketercapaian CPL dihitung dari nilai Sub-CPMK dengan bobot pada Tabel 1.6.

Tabel 1.10 Komponen penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Sub-CPMK yang diukur
1	Tugas Analisis Kasus	10	Sub-CPMK1, 2, 3
2	Kuis	10	Sub-CPMK1, 2
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	20	Sub-CPMK1–4
4	Proyek Rencana Aksi	40	Sub-CPMK4, 5, 6
5	Ujian Akhir Semester (UAS)	20	Sub-CPMK5–7
	Total	100	

Tabel 1.11 Konversi nilai akhir program sarjana

Nilai Akhir (Skala 100)	Huruf	Bobot	Predikat
85,00 – 100,00	A	4,00	Sangat baik
75,00 – 84,99	B	3,00	Baik
65,00 – 74,99	C	2,00	Cukup
50,00 – 64,99	D	1,00	Kurang
0,00 – 49,99	E	0,00	Mengulang

Batas minimal kelulusan adalah nilai D. Untuk keperluan OBE, ambang ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK ditetapkan pada skor 70. Apabila kurang dari 75% mahasiswa mencapai ambang pada suatu CPL, dilakukan intervensi berupa remedial, pengayaan, sesi asistensi, atau revisi metode dan asesmen.

■ 1.8 Ketuntasan Belajar dan Tindak Lanjut

Di akhir setiap unit, hitung tingkat penguasaan Anda terhadap latihan dengan rumus berikut.

Rumus tingkat penguasaan

$$\text{Tingkat penguasaan} = (\text{skor yang diperoleh} \div \text{skor maksimum}) \times 100\%$$

Tabel 1.12 Kriteria penguasaan dan tindak lanjut

Tingkat Penguasaan	Kategori	Tindak Lanjut
90% – 100%	Sangat baik	Lanjut ke unit berikutnya; kerjakan kegiatan pengayaan.
80% – 89%	Baik	Lanjut ke unit berikutnya.
70% – 79%	Cukup	Lanjut setelah meninjau bagian yang masih lemah.
< 70%	Kurang	Pelajari ulang unit, kerjakan remedial, dan konsultasikan kepada dosen.

Refleksi awal

Sebelum memulai Unit 1, tuliskan dalam 3–5 kalimat: nilai apa yang paling Anda pegang dalam hidup, dari mana nilai itu Anda peroleh, dan pernahkah nilai itu diuji oleh situasi tertentu? Simpan tulisan ini sebagai bahan esai reflektif pada Unit 6.

1

BAB II · UNIT 1 · MINGGU 1–2

Pancasila sebagai Dasar Karakter Bangsa

Konsep karakter bangsa, nilai filosofis Pancasila, dan relevansinya di era kontemporer

Sub-CPMK1

CPL-01

Bobot 15%

CPMK1

2.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK1

Mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis karakter bangsa dan mengaitkannya dengan realitas kehidupan berbangsa di era kontemporer melalui analisis kasus nyata.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mendeskripsikan pengertian karakter bangsa menurut minimal dua perspektif teoretis yang relevan.
- Mengidentifikasi kelima sila Pancasila beserta nilai filosofis yang dikandung masing-masing sila.
- Menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan praktik kehidupan berbangsa di era kontemporer berdasarkan contoh konkret.
- Menganalisis penerapan atau penyimpangan nilai Pancasila dalam satu kasus nyata menggunakan kerangka analisis yang terstruktur.
- Menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menilai kasus degradasi atau penguatan nilai kebangsaan.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK1	CPL-01	15%	2 minggu (680 menit)

2.2 Pemantik

Mari memulai

Sebuah video viral memperlihatkan warga dari berbagai agama bergotong royong membangun kembali rumah ibadah yang rusak diterjang banjir. Pada minggu yang sama, beredar pula berita tentang kepala daerah yang ditangkap karena menerima suap.

Keduanya adalah wajah Indonesia hari ini. Menurut Anda, nilai Pancasila mana yang tampak hidup, dan mana yang sedang diuji? Tuliskan jawaban awal Anda.

■ 2.3 Peta Konsep



Gambar 2.1 Peta konsep Unit 1

■ 2.4 Uraian Materi

2.4.1 Konsep Karakter dan Karakter Bangsa

Thomas Lickona memandang karakter yang baik sebagai kesatuan tiga komponen: **pengetahuan moral** (*moral knowing*), yaitu memahami apa yang baik; **perasaan moral** (*moral feeling*), yaitu menginginkan dan peduli pada yang baik; serta **tindakan moral** (*moral action*), yaitu kebiasaan melakukan yang baik. Orang yang tahu korupsi itu salah, tetapi tidak merasa terganggu dan tetap melakukannya, belum berkarakter baik.

Perspektif kedua datang dari proyek DeSeCo OECD yang disunting Rychen dan Salganik (2003). Proyek ini merumuskan kompetensi kunci warga dalam tiga kategori: bertindak secara otonom dan bertanggung jawab, menggunakan perangkat (bahasa, informasi, teknologi) secara interaktif, dan berinteraksi dalam kelompok yang heterogen. Dalam konteks ini, karakter bukan hanya urusan moral pribadi, tetapi juga kemampuan hidup bersama dalam masyarakat yang beragam.

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif yang khas, yang tercermin dalam cara warga berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai bersama. Bagi Indonesia, nilai-nilai bersama itu bersumber dari Pancasila.

2.4.2 Pancasila sebagai Dasar Filosofis

Rumusan Pancasila lahir melalui proses sejarah: pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga pengesahan Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, yang memuat rumusan Pancasila yang berlaku hingga kini. Kaelan (2016) menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.

Kaelan juga membedakan tiga tingkatan nilai. **Nilai dasar** adalah nilai-nilai Pancasila yang bersifat tetap. **Nilai instrumental** adalah penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan. **Nilai praksis** adalah wujudnya dalam perilaku sehari-hari. Karakter bangsa diuji pada tingkat praksis.

Tabel 2.1 Nilai filosofis sila-sila Pancasila

Sila	Nilai pokok	Wujud praksis dalam karakter
Ketuhanan Yang Maha Esa	Religiusitas, toleransi beragama	Beribadah sesuai keyakinan, menghormati pemeluk agama lain

Sila	Nilai pokok	Wujud praksis dalam karakter
Kemanusiaan yang adil dan beradab	Martabat manusia, keadilan, peradaban	Menolak diskriminasi dan kekerasan, empati
Persatuan Indonesia	Persatuan dalam keberagaman, cinta tanah air	Mengutamakan kepentingan bangsa, menghargai budaya daerah lain
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	Demokrasi, musyawarah, kedaulatan rakyat	Menghormati keputusan bersama, berpartisipasi secara santun
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Keadilan, kesejahteraan bersama	Tidak serakah, menolak korupsi, peduli kelompok lemah

Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam kajian filsafat Pancasila dikenal pandangan bahwa susunan sila bersifat hierarkis-piramidal: setiap sila menjiwai dan dijiwai sila lainnya. Karena itu, analisis kasus sebaiknya tidak memisahkan sila secara kaku.

2.4.3 Pancasila di Era Kontemporer

Tantangan karakter bangsa hari ini berbeda dari masa lalu. Arus informasi digital mempercepat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian; polarisasi politik dapat merenggangkan persatuan; gaya hidup konsumtif menggerus kesederhanaan; dan korupsi terus menggerogoti keadilan sosial. Di sisi lain, era digital juga membuka peluang: gerakan solidaritas daring, transparansi anggaran, dan kampanye antikorupsi dapat menjangkau lebih banyak orang.

2.4.4 Kerangka Analisis Kasus Berbasis Nilai Pancasila

Gunakan lima langkah berikut untuk menganalisis kasus: (1) uraikan fakta kasus secara ringkas dan bersumber; (2) identifikasi sila dan nilai yang relevan; (3) nilai apakah kasus menunjukkan penguatan atau penyimpangan nilai, beserta buktinya; (4) jelaskan implikasinya bagi karakter bangsa; dan (5) rumuskan sikap atau tindakan yang seharusnya diambil. Kerangka ini akan terus dipakai hingga penyusunan Rencana Aksi Karakter.

■ 2.5 Studi Kasus

Dua peristiwa di Kota Tanjung Bening (kasus ilustrasi)

Menjelang pemilihan kepala daerah, akun-akun anonim di media sosial menyebarkan video sunting yang menuduh salah satu calon menghina kelompok agama tertentu. Suasana kota memanas. Sekelompok pemuda lintas agama kemudian membuat video klarifikasi berdasarkan rekaman utuh, mengajak warga memeriksa fakta sebelum membagikan informasi, dan menggelar doa bersama. Beberapa hari kemudian, pihak berwenang menyatakan video awal telah dimanipulasi.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Nilai sila mana yang disimpangi oleh penyebar video, dan nilai sila mana yang diperkuat oleh kelompok pemuda?
2. Analisis kasus ini dengan lima langkah pada Subbab 2.4.4.
3. Menggunakan kerangka Lickona, komponen karakter mana yang tampak pada kelompok pemuda?

■ 2.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 1 — Mengenal karakter bangsa dan Pancasila

Luring (kelas)

- Dosen membuka dengan kontrak belajar, orientasi RPS, dan paparan konsep dasar karakter bangsa serta kerangka nilai Pancasila.
- Mahasiswa mendiskusikan berita yang telah ditelusuri secara berpasangan, lalu mempresentasikan kaitan berita tersebut dengan nilai sila Pancasila.
- Kelompok proyek (3–4 orang) mulai dibentuk dan memilih komunitas KTI.

Daring (LMS)

- Tonton video pengantar tentang karakter bangsa dan Pancasila di LMS.
- Telusuri satu berita aktual tentang penguatan atau penyimpangan nilai Pancasila dan unggah tautannya ke forum.

Luaran: Refleksi tertulis individual 300–400 kata tentang satu nilai Pancasila dan relevansinya dengan pengalaman Anda.

Minggu 2 — Analisis kasus berbasis nilai Pancasila

Luring (kelas)

- Mahasiswa mempresentasikan analisis kasus pilihannya dalam kelompok kecil (4–5 orang) dan menemukan pola nilai yang hadir atau absen.
- Dosen memberi penguatan konseptual dan umpan balik.
- Kuis daring 10 soal pilihan ganda dan isian singkat.

Daring (LMS)

- Pelajari templat kerangka analisis kasus di LMS.
- Kumpulkan **Formulir Topik** proyek akhir (nama komunitas, lokasi, alasan pemilihan, anggota tim).

Luaran: Laporan analisis kasus individual 500–600 kata dan Formulir Topik kelompok.

■ 2.7 Rangkuman

- Karakter yang baik menurut Lickona memadukan pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral; DeSeCo menekankan kompetensi hidup bersama dalam masyarakat heterogen.
- Pancasila berkedudukan sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional.
- Nilai Pancasila dapat dibedakan menjadi nilai dasar, instrumental, dan praksis; karakter diuji pada tingkat praksis.
- Era digital membawa tantangan baru (hoaks, polarisasi, korupsi) sekaligus peluang penguatan nilai.
- Analisis kasus dilakukan melalui lima langkah: fakta, sila, penilaian, implikasi, dan sikap.

■ 2.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

- Menurut Lickona, karakter yang baik terdiri atas ...
 - pengetahuan, keterampilan, dan sikap
 - pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral
 - iman, ilmu, dan amal
 - disiplin, jujur, dan kerja keras
- Pengesahan Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan Pancasila yang berlaku hingga kini dilakukan oleh PPKI pada ...
 - 1 Juni 1945
 - 22 Juni 1945
 - 17 Agustus 1945
 - 18 Agustus 1945
- Penjabaran nilai Pancasila dalam undang-undang dan kebijakan disebut nilai ...
 - dasar
 - instrumental
 - praksis
 - universal
- Menyebarkan video hasil suntingan untuk memfitnah kelompok agama tertentu paling bertentangan dengan nilai ...
 - sila kedua dan ketiga
 - sila keempat saja
 - sila kelima saja
 - tidak bertentangan dengan sila mana pun
- Langkah pertama dalam kerangka analisis kasus berbasis nilai Pancasila adalah ...
 - merumuskan sikap
 - mengidentifikasi sila
 - menguraikan fakta kasus secara ringkas dan bersumber
 - menjelaskan implikasi

B. Uraian

- Jelaskan perbedaan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila, lalu berikan satu contoh masing-masing untuk sila kelima.
- Analisis satu kasus aktual penguatan atau penyimpangan nilai Pancasila menggunakan lima langkah pada Subbab 2.4.4.

■ 2.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 2.2 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Lickona membagi karakter menjadi moral knowing, moral feeling, dan moral action.
2	D	PPKI mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.
3	B	Nilai instrumental adalah penjabaran nilai dasar dalam peraturan dan kebijakan.
4	A	Fitnah merendahkan martabat manusia (sila kedua) dan mengancam persatuan (sila ketiga).
5	C	Analisis dimulai dari fakta yang bersumber.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Pengertian ketiga tingkatan nilai tepat (skor maksimal 10).
- Contoh untuk sila kelima relevan dan konkret (skor maksimal 10).
- Penjelasan runtut (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Fakta ringkas dan bersumber (skor maksimal 5).
- Identifikasi sila dan penilaian disertai bukti (skor maksimal 10).
- Implikasi dan sikap yang dirumuskan logis (skor maksimal 10).

■ 2.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Baca ulang Subbab 2.4.2 dan 2.4.4, susun ulang Tabel 2.1 dengan contoh dari lingkungan Anda sendiri, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Bandingkan rumusan Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945, Piagam Jakarta, dan Pembukaan UUD 1945 dalam tabel, lalu tulis catatan 300 kata tentang makna perubahan tersebut bagi persatuan bangsa.

■ 2.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Nilai Pancasila mana yang paling kuat dalam keseharian Anda, dan mana yang paling sulit dijalankan?
2. Apakah refleksi awal Anda tentang nilai hidup berkaitan dengan salah satu sila?
3. Bagaimana Anda memastikan informasi yang Anda bagikan di media sosial sudah diperiksa kebenarannya?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan **Harmony**: menilai kasus secara jujur dan berbasis fakta, serta bersikap terbuka dan menghormati perspektif sesama dalam diskusi.

■ 2.12 Referensi Unit

- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila* (Edisi Revisi). Paradigma.
- Lickona, T. (2009). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (Eds.). (2003). *Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society*. Hogrefe & Huber.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2

BAB III · UNIT 2 · MINGGU 3–4

Integritas Kebangsaan dan Identitas Nasional

Unsur identitas nasional dan ragam ekspresi kebangsaan dalam budaya lokal Kawasan Timur Indonesia

Sub-CPMK2

CPL-01

Bobot 14%

CPMK1

■ 3.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK2

Menjelaskan konsep integritas kebangsaan dan identitas nasional serta membandingkan ekspresi kebangsaan pada berbagai konteks budaya lokal Kawasan Timur Indonesia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep integritas kebangsaan dan identitas nasional berdasarkan referensi yang sahih.
- Mengidentifikasi elemen-elemen pembentuk identitas nasional Indonesia dan keterkaitannya dengan karakter bangsa.
- Membandingkan ekspresi kebangsaan dari minimal tiga konteks budaya lokal KTI menggunakan kriteria yang terstruktur dan berbasis data.
- Menganalisis tantangan dan peluang penguatan identitas nasional di tengah keberagaman budaya KTI.
- Menunjukkan penghargaan terhadap keragaman ekspresi kebangsaan sebagai kekuatan bangsa.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK1	CPL-01	14%	2 minggu (680 menit)

■ 3.2 Pemantik

Mari memulai

Seorang mahasiswa dari Maluku, seorang dari Papua, seorang dari Gorontalo, dan seorang dari Nusa Tenggara Timur tinggal dalam satu rumah kos. Mereka berbeda bahasa ibu, makanan kesukaan, dan cara beribadah, tetapi sama-sama berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang.

Apa yang membuat mereka merasa "sama-sama Indonesia"? Apakah keindonesiaan itu menghapus identitas daerah mereka, atau justru dibangun dari sana?

■ 3.3 Peta Konsep



Gambar 3.1 Peta konsep Unit 2

■ 3.4 Uraian Materi

3.4.1 Identitas Nasional

Identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki suatu bangsa dan membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional Indonesia tidak menghapus identitas suku dan daerah, melainkan menjadi payung yang menyatukannya, sebagaimana semboyan **Bhinneka Tunggal Ika** yang diambil dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular.

Tabel 3.1 Unsur pembentuk identitas nasional Indonesia

Jenis	Unsur	Keterkaitan dengan karakter bangsa
Identitas fundamental	Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup	Sumber nilai bersama yang menjadi ukuran perilaku
Identitas instrumental	UUD 1945, bahasa Indonesia, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan (diatur dalam UU 24/2009)	Sarana pemersatu dan simbol kesetiaan kepada bangsa
Identitas alamiah	Negara kepulauan dengan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya	Menuntut sikap toleran dan kemampuan hidup dalam keberagaman

3.4.2 Integritas Kebangsaan

Integritas kebangsaan adalah konsistensi antara komitmen dan tindakan terhadap nilai-nilai kebangsaan: setia pada Pancasila dan NKRI, menghargai keberagaman, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Modul Nasionalisme dalam Pelatihan Dasar CPNS yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara menjabarkan nasionalisme ASN sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas. Integritas kebangsaan diuji bukan pada saat upacara, melainkan ketika kepentingan pribadi atau kelompok berbenturan dengan kepentingan bangsa.

3.4.3 Ekspresi Kebangsaan dalam Budaya Lokal KTI

Banyak kearifan lokal di KTI mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila dan dapat menjadi modal karakter bangsa. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Contoh kearifan lokal KTI dan nilai kebangsaannya

Daerah	Kearifan lokal	Makna ringkas	Nilai Pancasila yang sejalan
Gorontalo	<i>Huyula</i>	Tradisi kerja bersama atau gotong royong	Persatuan, keadilan sosial
Maluku	<i>Pela gandong</i>	Ikatan persaudaraan antarnegeri (desa), termasuk lintas agama	Ketuhanan yang toleran, persatuan
Sulawesi Selatan	<i>Siri' na pacce</i>	Harga diri dan solidaritas terhadap penderitaan sesama	Kemanusiaan
Sulawesi Utara	<i>Mapalus</i> ; semboyan <i>torang samua basudara</i>	Gotong royong dan persaudaraan semua warga	Persatuan
Fakfak, Papua Barat	<i>Satu tungku tiga batu</i>	Falsafah kerukunan antarumat beragama dalam satu keluarga besar	Ketuhanan, persatuan

Kearifan lokal juga berperan dalam memulihkan persatuan. Setelah konflik sosial di Maluku pada 1999–2002, ikatan *pela gandong* termasuk modal budaya yang dipakai dalam upaya rekonsiliasi. Ketika mengkaji kearifan lokal, hindari romantisasi: periksa pula apakah ada praktik yang justru eksklusif atau bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

3.4.4 Membandingkan Ekspresi Kebangsaan

Gunakan kriteria yang sama untuk setiap konteks budaya agar perbandingan adil dan sistematis: (1) bentuk ekspresi (ritual, semboyan, lembaga, praktik sosial); (2) nilai yang dikandung; (3) kaitannya dengan sila Pancasila; (4) tantangan kontemporer (urbanisasi, media sosial, politik identitas); dan (5) peluang penguatan melalui pendidikan, pelayanan publik, atau inovasi komunitas. Setiap klaim harus didukung sumber, misalnya kajian etnografi, dokumen resmi daerah, atau pemberitaan terverifikasi.

Tautan ke proyek akhir

Hasil unit ini menjadi bahan **Lembar Peta Nilai** kelompok (maksimal 2 halaman, dikumpulkan akhir Minggu 5): minimal tiga nilai sila Pancasila yang relevan dengan komunitas pilihan serta ekspresi kebangsaan atau kearifan lokal setempat yang dapat menjadi modal karakter, disusun secara spesifik dan berbasis fakta, bukan generik.

■ 3.5 Studi Kasus

Festival budaya di Kabupaten Nusa Rukun (kasus ilustrasi)

Pemerintah Kabupaten Nusa Rukun menggelar festival tahunan yang menampilkan tradisi kerja bersama dari berbagai suku. Tahun ini, panitia hanya menampilkan tradisi suku mayoritas dengan alasan keterbatasan anggaran. Organisasi pemuda dari suku-suku lain memprotes dan menilai festival itu tidak lagi mencerminkan keberagaman. Setelah dialog difasilitasi tokoh adat dan tokoh agama, panitia sepakat menggilir tradisi setiap tahun dan melibatkan sanggar dari semua suku.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Unsur identitas nasional mana yang diuji dalam kasus ini?
2. Bagaimana integritas kebangsaan tampak dalam penyelesaian konflik?

3. Rancang satu kriteria tambahan yang sebaiknya dipakai panitia agar festival mencerminkan identitas nasional yang inklusif.

■ 3.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 3 — Identitas nasional dan peta perbandingan

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan kerangka integritas kebangsaan dan identitas nasional, lalu memfasilitasi diskusi panel lintas daerah asal.
- Mahasiswa mempresentasikan draf peta perbandingan dan berdialog tentang keragaman sebagai kekuatan bangsa.

Daring (LMS)

- Baca materi dan tonton video tentang identitas nasional dan kearifan lokal KTI.
- Kumpulkan informasi tentang dua konteks budaya lokal KTI dari sumber yang sah.

Luaran: Peta perbandingan (satu halaman) ekspresi kebangsaan pada dua konteks budaya lokal KTI.

Minggu 4 — Laporan komparatif dan presentasi

Luring (kelas)

- Mahasiswa atau pasangan mempresentasikan laporan komparatif (5–7 menit) diikuti tanya-jawab.
- Dosen memberi umpan balik berbasis rubrik dan merangkum pola keberagaman identitas nasional di KTI.

Daring (LMS)

- Lengkapi data dan rujukan laporan di LMS.
- Kelompok proyek mulai menyusun Lembar Peta Nilai untuk komunitas pilihan.

Luaran: Laporan komparatif tertulis 600–750 kata tentang ekspresi kebangsaan dari minimal tiga konteks budaya KTI.

■ 3.7 Rangkuman

- Identitas nasional adalah ciri khas bangsa yang menyatukan identitas daerah tanpa menghapusnya, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- Unsur identitas nasional meliputi identitas fundamental (Pancasila), instrumental (UUD, bahasa, simbol negara), dan alamiah (kepulauan dan keragaman).
- Integritas kebangsaan adalah konsistensi komitmen dan tindakan terhadap nilai kebangsaan, terutama ketika kepentingan berbenturan.
- Kearifan lokal KTI seperti huyula, pela gandong, siri' na pacce, mapalus, dan satu tungku tiga batu mengandung nilai yang sejalan dengan Pancasila.
- Perbandingan ekspresi kebangsaan harus memakai kriteria yang sama dan berbasis sumber, tanpa romantisasi.

■ 3.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari ...
 - A. Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca
 - B. Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular
 - C. Piagam Jakarta
 - D. Sumpah Pemuda
2. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan termasuk identitas nasional yang bersifat ...
 - A. fundamental
 - B. instrumental
 - C. alamiah
 - D. kultural lokal
3. Ikatan persaudaraan antarnegeri di Maluku, termasuk lintas agama, dikenal sebagai ...
 - A. huyula
 - B. mapalus
 - C. pela gandong
 - D. siri' na pacce
4. Integritas kebangsaan paling teruji ketika ...
 - A. mengikuti upacara bendera
 - B. kepentingan pribadi atau kelompok berbenturan dengan kepentingan bangsa
 - C. menghafal lagu kebangsaan
 - D. mengunjungi daerah lain
5. Sikap yang tepat dalam mengkaji kearifan lokal adalah ...
 - A. menerima semua praktik tanpa kritik
 - B. menolak semua tradisi
 - C. menghargai sekaligus memeriksa kesesuaiannya dengan nilai kemanusiaan
 - D. hanya mengkaji budaya suku sendiri

B. Uraian

1. Jelaskan unsur-unsur identitas nasional Indonesia dan hubungannya dengan karakter bangsa. Berikan contoh untuk setiap unsur.
2. Bandingkan ekspresi kebangsaan pada dua konteks budaya lokal KTI menggunakan lima kriteria pada Subbab 3.4.4.

■ 3.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 3.3 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Semboyan tersebut berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular.
2	B	Keempatnya adalah sarana pemersatu yang diatur dalam UU 24/2009.
3	C	Pela gandong adalah ikatan persaudaraan antarnegeri di Maluku.
4	B	Integritas terlihat dari konsistensi tindakan ketika kepentingan berbenturan.
5	C	Kajian kearifan lokal perlu apresiatif sekaligus kritis.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Tiga jenis identitas dijelaskan tepat (skor maksimal 10).
- Hubungan dengan karakter bangsa diuraikan (skor maksimal 10).
- Contoh relevan (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Kedua konteks dijelaskan dengan sumber (skor maksimal 8).
- Perbandingan memakai kriteria yang sama secara sistematis (skor maksimal 12).
- Sikap apresiatif dan kritis tampak dalam argumen (skor maksimal 5).

■ 3.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Lengkapi Tabel 3.2 dengan satu kearifan lokal dari daerah asal Anda beserta sumbernya, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Wawancarai (secara daring atau langsung) satu tokoh masyarakat dari daerah asal Anda tentang kearifan lokal yang masih hidup, lalu tulis catatan 300 kata dengan menjaga etika dan kerahasiaan narasumber.

■ 3.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Apa yang Anda pelajari dari budaya rekan yang berasal dari daerah lain?
2. Adakah prasangka tentang daerah lain yang berubah setelah diskusi?
3. Bagaimana identitas daerah Anda memperkaya keindonesiaan Anda?

NILAI ICHSA-N

Nationalism dan **Harmony**: menghargai dan merayakan keberagaman budaya lokal sebagai ekspresi kebangsaan yang otentik, serta menghormati identitas budaya rekan dari daerah lain.

■ 3.12 Referensi Unit

Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila* (Edisi Revisi). Paradigma.

Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Nasionalisme*. LAN RI.

Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (Eds.). (2003). *Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society*. Hogrefe & Huber.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

3

BAB IV · UNIT 3 · MINGGU 5–6

Etika Pemerintahan dan Good Governance

Prinsip tata kelola yang baik, asas umum pemerintahan yang baik, dan evaluasi kasus pemerintahan daerah

Sub-CPMK3

CPL-01

Bobot 14%

CPMK2

■ 4.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK3

Menganalisis prinsip-prinsip etika pemerintahan yang baik (good governance) dan mengevaluasi penerapannya pada kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi minimal lima prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, responsivitas) beserta indikator operasionalnya dalam konteks pemerintahan daerah.
- Menganalisis kesesuaian praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah aktual dengan prinsip good governance.
- Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tata kelola pemerintahan daerah di KTI berdasarkan bukti empiris dari kasus konkret.
- Membandingkan pola kegagalan dan keberhasilan tata kelola lintas kasus berdasarkan dimensi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
- Mengembangkan rekomendasi perbaikan tata kelola yang kontekstual dan berbasis nilai Pancasila.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK2	CPL-01	14%	2 minggu (680 menit)

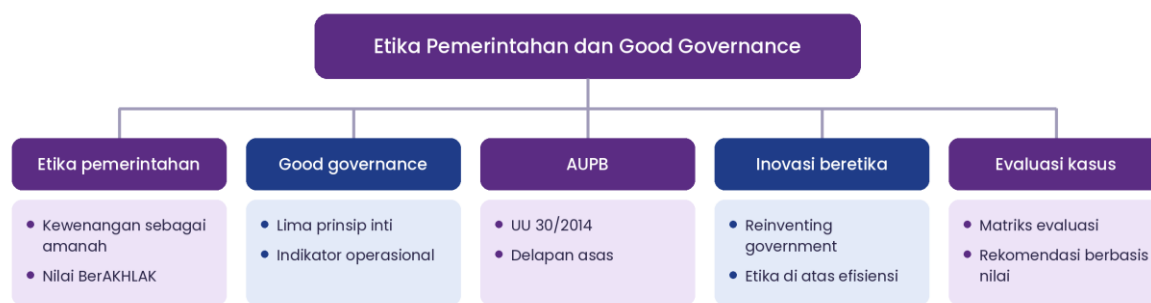
■ 4.2 Pemantik

Mari memulai

Seorang warga membutuhkan akta kelahiran anaknya. Di kantor pertama, persyaratan tertempel jelas, antrian tertib, dan dokumen selesai dalam sehari tanpa biaya. Di kantor kedua, persyaratan berubah-ubah, petugas menyarankan "jalur cepat" dengan imbalan, dan pengaduan tidak pernah dijawab.

Apa saja yang membedakan kedua kantor itu? Tuliskan minimal tiga perbedaan, lalu beri nama pada setiap perbedaan tersebut.

■ 4.3 Peta Konsep



Gambar 4.1 Peta konsep Unit 3

■ 4.4 Uraian Materi

4.4.1 Etika Pemerintahan dan Etika Publik

Etika pemerintahan adalah seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangan publik. Kewenangan publik adalah amanah, bukan milik pribadi; karena itu, setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Bagi ASN, nilai dasar tersebut kini dirumuskan sebagai nilai **BerAKHLAK** (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang dikukuhkan dalam UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Modul Etika Publik Latsar CPNS dari LAN menjabarkan etika ini ke dalam kode etik dan kode perilaku.

4.4.2 Prinsip-Prinsip Good Governance

Good governance atau pemerintahan yang baik adalah tata kelola yang melibatkan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara seimbang dan bertanggung jawab. UNDP (1997) merumuskan karakteristiknya, antara lain partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Sedarmayanti (2012) menjabarkan prinsip-prinsip ini dalam konteks pemerintahan Indonesia.

Tabel 4.1 Lima prinsip inti good governance dan indikator operasionalnya

Prinsip	Makna	Indikator operasional di pemerintah daerah
Transparansi	Keterbukaan informasi tentang kebijakan, anggaran, dan layanan	APBD dan standar layanan dapat diakses publik; PPID berfungsi
Akuntabilitas	Setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan	Laporan kinerja terbit; opini BPK atas laporan keuangan; tindak lanjut temuan
Partisipasi	Warga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan	Musrenbang inklusif; forum konsultasi publik; keterlibatan kelompok rentan
Supremasi hukum	Penyelenggaraan berdasarkan hukum yang adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu	Keputusan sesuai prosedur; sanksi pelanggaran ditegakkan
Responsivitas	Pemerintah cepat dan tepat merespons kebutuhan dan pengaduan warga	Pengaduan dijawab sesuai tenggat; perbaikan layanan dari umpan balik

4.4.3 Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip tata kelola yang baik dituangkan sebagai **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)** dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. AUPB menjadi ukuran sah atau tidaknya tindakan pejabat pemerintahan.

4.4.4 Semangat Wirausaha dalam Pemerintahan

Osborne dan Gaebler (1992) dalam *Reinventing Government* mengusulkan pemerintahan yang lebih berorientasi hasil, misi, dan pelanggan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Gagasan ini relevan bagi CPL-10: inovasi pelayanan publik harus tetap berpijak pada etika. Efisiensi dan kreativitas tidak boleh mengorbankan akuntabilitas dan keadilan.

4.4.5 Mengevaluasi Kasus Tata Kelola Daerah

Evaluasi kasus mengikuti tiga dimensi penilaian yang dipakai dalam unit ini: **kedalaman identifikasi prinsip** (30%), **ketajaman evaluasi kasus** (40%), dan **kualitas argumentasi etis** (30%). Langkahnya: (1) uraikan kasus dan sumber datanya; (2) pilih prinsip yang relevan beserta indikatornya; (3) nilai praktik terhadap setiap indikator dengan bukti; (4) temukan akar masalah; dan (5) rumuskan rekomendasi yang kontekstual dan berbasis nilai Pancasila. Sumber data yang dapat dipakai antara lain laporan hasil pemeriksaan BPK, hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman, laporan kinerja instansi, dan kanal pengaduan SP4N-LAPOR!.

Tabel 4.2 Matriks evaluasi good governance (contoh format)

Prinsip	Indikator	Bukti dan sumber	Penilaian	Rekomendasi
Transparansi	...	...	Kuat / sedang / lemah	...
Akuntabilitas	...	...	...	...
Partisipasi	...	...	...	...

■ 4.5 Studi Kasus

Dua kabupaten, dua cerita (kasus ilustrasi)

Kabupaten Sinar Pagi mempublikasikan APBD dalam bentuk infografis, membuka kanal pengaduan yang dijawab rata-rata dalam tiga hari, dan melibatkan kelompok perempuan serta penyandang disabilitas dalam musrenbang. Laporan keuangannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dua tahun berturut-turut.

Kabupaten Batu Kelam tidak mempublikasikan APBD, sejumlah proyek dikerjakan kontraktor yang sama setiap tahun, dan pengaduan warga tentang puskesmas tidak dijawab. Musrenbang hanya dihadiri aparat desa.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran dan tidak merujuk pada daerah tertentu.

Pertanyaan analisis:

1. Evaluasi kedua kabupaten menggunakan lima prinsip pada Tabel 4.1.
2. Asas AUPB mana yang berpotensi dilanggar di Kabupaten Batu Kelam?
3. Rumuskan tiga rekomendasi perbaikan bagi Kabupaten Batu Kelam yang berbasis nilai Pancasila.

■ 4.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 5 — Prinsip good governance dan think-pair-share

Luring (kelas)

- Dosen memfasilitasi diskusi kelas berbasis kasus dengan metode *think-pair-share*: mahasiswa berpasangan mendiskusikan analisis awal, lalu memaparkan poin kritis.
- Dosen menghubungkan kasus lokal dengan prinsip good governance.

Daring (LMS)

- Tonton video tentang prinsip good governance dan AUPB, lalu baca satu kasus pemerintahan daerah yang disediakan.
- Kelompok proyek menyelesaikan **Lembar Peta Nilai** (akhir Minggu 5).

Luaran: Catatan analisis kasus tata kelola dengan matriks evaluasi dan Lembar Peta Nilai kelompok.

Minggu 6 — Evaluasi komprehensif dan presentasi kelompok

Luring (kelas)

- Setiap kelompok memaparkan analisis dan rekomendasi (10–12 menit) diikuti tanya jawab (5 menit).
- Dosen memberi umpan balik berbasis rubrik dan menyintesis pola lintas kelompok.
- Kuis daring: 10 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian pendek.

Daring (LMS)

- Siapkan makalah analisis kasus kelompok yang membandingkan minimal dua kasus.
- Kelompok proyek mulai memetakan prinsip good governance pada komunitas pilihan.

Luaran: Makalah analisis kasus kelompok dan presentasinya.

■ 4.7 Rangkuman

- Etika pemerintahan memandang kewenangan publik sebagai amanah; nilai dasar ASN dirumuskan sebagai BerAKHLAK dalam UU 20/2023.
- Good governance mencakup partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan prinsip lain menurut UNDP.
- AUPB dalam UU 30/2014 menjadi ukuran hukum tindakan pejabat pemerintahan.
- Inovasi dan semangat wirausaha dalam pemerintahan harus tetap berpijak pada etika.
- Evaluasi kasus tata kelola dilakukan dengan indikator, bukti bersumber, akar masalah, dan rekomendasi berbasis nilai.

■ 4.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Pemerintah daerah yang mempublikasikan APBD dan standar layanan secara terbuka menerapkan prinsip ...
 - A. responsivitas
 - B. transparansi
 - C. supremasi hukum
 - D. orientasi konsensus
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam ...
 - A. UU 23/2014
 - B. UU 30/2014
 - C. UU 20/2023
 - D. UU 24/2009
3. Nilai dasar ASN "BerAKHLAK" antara lain mencakup ...
 - A. berani, adil, dan kreatif
 - B. berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif
 - C. bersih, aman, dan lestari
 - D. beriman, arif, dan kuat
4. Pengaduan warga yang tidak pernah dijawab menunjukkan lemahnya prinsip ...
 - A. responsivitas
 - B. kepastian hukum
 - C. efisiensi
 - D. visi strategis
5. Dalam evaluasi kasus pada unit ini, dimensi dengan bobot terbesar adalah ...
 - A. kedalaman identifikasi prinsip
 - B. ketajaman evaluasi kasus
 - C. kualitas argumentasi etis
 - D. kerapian format

B. Uraian

1. Jelaskan lima prinsip inti good governance beserta satu indikator operasional masing-masing di tingkat pemerintah daerah.
2. Evaluasi satu kasus tata kelola pemerintahan daerah dengan matriks pada Tabel 4.2 dan rumuskan dua rekomendasi berbasis nilai Pancasila.

■ 4.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 4.3 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Keterbukaan informasi adalah wujud transparansi.
2	B	AUPB diatur dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3	B	BerAKHLAK adalah Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
4	A	Responsivitas menuntut pemerintah merespons kebutuhan dan pengaduan warga.
5	B	Ketajaman evaluasi kasus berbobot 40%.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Lima prinsip dijelaskan tepat (skor maksimal 10).
- Indikator operasional relevan dan terukur (skor maksimal 10).
- Penjelasan runtut (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Identifikasi prinsip dan indikator tepat (skor maksimal 8).
- Evaluasi tajam dengan bukti bersumber (skor maksimal 10).
- Rekomendasi kontekstual dan argumen etis kuat (skor maksimal 7).

■ 4.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Kerjakan ulang evaluasi Kabupaten Batu Kelam menggunakan Tabel 4.1 dan 4.2, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Telusuri hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik Ombudsman RI untuk kabupaten/kota asal Anda dan tulis catatan 300 kata tentang prinsip good governance yang paling perlu diperbaiki.

■ 4.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Pernahkah Anda mengalami pelayanan publik yang baik atau buruk? Prinsip apa yang paling terasa?
2. Apa yang akan Anda lakukan jika kelak menjadi aparatur dan diminta mempercepat layanan dengan imbalan?
3. Bagaimana kelompok Anda membagi tugas dalam presentasi minggu ini?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan Harmony: menyusun analisis secara jujur dan berbasis bukti, serta merespons pandangan rekan secara kritis dan santun dalam diskusi kelompok.

■ 4.12 Referensi Unit

- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan yang Baik*. Mandar Maju.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Etika Publik*. LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Akuntabilitas*. LAN RI.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. (bacaan pengayaan)

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*.
UNDP. (bacaan pengayaan)

4

BAB V · UNIT 4 · MINGGU 7

Antikorupsi dan Perilaku Koruptif

Nilai antikorupsi, bentuk perilaku koruptif di pemerintahan dan kampus, serta faktor penyebabnya

Sub-CPMK4

CPL-01

Bobot 7%

CPMK2

■ 5.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK4

Menjelaskan prinsip antikorupsi dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku koruptif di lingkungan pemerintahan dan akademik melalui studi kasus berbasis Project-Based Learning.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menjelaskan sembilan nilai antikorupsi beserta relevansinya dalam konteks pemerintahan dan lingkungan akademik.
- Mengidentifikasi bentuk perilaku koruptif (gratifikasi, suap, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan plagiarisme akademik) dalam skenario kasus beserta dasar normatif yang dilanggar.
- Menganalisis faktor penyebab dan kondisi pemungkin perilaku koruptif di lingkungan pemerintahan daerah dan akademik.
- Merancang langkah pencegahan perilaku koruptif yang realistis bagi komunitas atau lembaga.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK2	CPL-01	7%	1 minggu (340 menit)

■ 5.2 Pemantik

Mari memulai

Menjelang ujian, seorang mahasiswa menawarkan diri menitipkan tanda tangan kehadiran temannya. Seorang lagi memberikan bingkisan kepada dosen pembimbing "sebagai tanda terima kasih" sebelum nilai keluar. Seorang lainnya menyalin tugas dari internet tanpa menyebut sumber.

Apakah ketiganya termasuk perilaku koruptif? Jika korupsi terasa "kecil" di kampus, apa yang terjadi ketika mahasiswa itu kelak memegang jabatan publik?

■ 5.3 Peta Konsep



Gambar 5.1 Peta konsep Unit 4

■ 5.4 Uraian Materi

5.4.1 Pengertian dan Bentuk Korupsi

Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. KPK mengelompokkan rumusan delik dalam undang-undang tersebut menjadi tujuh kelompok besar.

Tabel 5.1 Tujuh kelompok tindak pidana korupsi

Kelompok	Contoh perbuatan
Kerugian keuangan negara	Menggelembungkan harga proyek sehingga merugikan anggaran
Suap-menyuap	Memberi uang agar izin atau jabatan diperoleh
Penggelapan dalam jabatan	Menggunakan dana kegiatan untuk kepentingan pribadi
Pemerasan	Pejabat memaksa warga membayar di luar ketentuan
Perbuatan curang	Kontraktor mengurangi spesifikasi bangunan
Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pejabat ikut mengatur tender yang dimenangkan perusahaan keluarganya
Gratifikasi	Pemberian kepada pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak dilaporkan

Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dianggap suap apabila tidak dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima (UU 20/2001 Pasal 12B dan 12C). Di samping itu, UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menegaskan larangan **nepotisme**, yaitu perbuatan penyelenggara negara yang menguntungkan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat.

5.4.2 Korupsi di Lingkungan Akademik

Perilaku koruptif tidak hanya terjadi di pemerintahan. Di kampus, bentuknya antara lain **plagiarisme**, titip absen, menggunakan joki untuk tugas atau ujian, memanipulasi data penelitian, dan memberi atau menerima gratifikasi untuk nilai. Perilaku ini melatih kebiasaan tidak jujur yang dapat terbawa ke dunia kerja. Karena itu, integritas akademik adalah latihan pertama integritas publik.

5.4.3 Sembilan Nilai Antikorupsi

Tabel 5.2 Sembilan nilai antikorupsi

Kelompok	Nilai	Wujud di kampus dan pemerintahan
Inti	Jujur, disiplin, tanggung jawab	Mengerjakan tugas sendiri; hadir tepat waktu; menyelesaikan amanah
Sikap	Adil, berani, peduli	Memperlakukan warga setara; berani menolak suap; peduli kepentingan publik
Etos kerja	Kerja keras, sederhana, mandiri	Berprestasi tanpa jalan pintas; hidup tidak berlebihan; tidak bergantung pada koneksi

5.4.4 Faktor Penyebab dan Kondisi Pemungkin

Beberapa kerangka membantu menjelaskan mengapa korupsi terjadi. **Teori GONE** menyebut empat faktor: keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*need*), dan pengungkapan atau sanksi yang lemah (*exposure*). **Segitiga kecurangan** (*fraud triangle*) menekankan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, yakni pembenaran diri seperti "semua orang juga melakukannya". Klitgaard merumuskan bahwa korupsi cenderung tinggi ketika **monopoli** kewenangan dan **diskresi** besar tidak diimbangi **akuntabilitas**.

Kerangka ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi harus bekerja pada dua sisi: memperkuat karakter individu (mengurangi keserakahan dan rasionalisasi) dan memperbaiki sistem (mengurangi kesempatan, membatasi diskresi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi).

5.4.5 Merancang Langkah Pencegahan

Langkah pencegahan yang baik bersifat spesifik dan dapat dilaksanakan komunitas, misalnya: memasang standar layanan dan biaya secara terbuka; menyediakan kanal pengaduan yang aman; membiasakan pelaporan gratifikasi; menerapkan pemeriksaan kemiripan naskah dan pernyataan orisinalitas untuk tugas mahasiswa; atau membentuk kelompok pemantau warga. Langkah-langkah ini akan dikembangkan menjadi komponen akuntabilitas dan antikorupsi dalam Rencana Aksi Karakter.

Tagihan antara proyek: Laporan Analisis Kritis (akhir Minggu 8)

Kelompok menyusun laporan maksimal 4 halaman yang mengevaluasi penerapan minimal **empat prinsip good governance** dan mengidentifikasi minimal **tiga bentuk perilaku koruptif** atau risiko koruptif pada komunitas pilihan, secara terstruktur dengan argumen berbasis data atau kasus yang dapat diverifikasi.

Persiapan UTS (Minggu 8)

UTS berbentuk tes tertulis esai analitis yang mencakup Sub-CPMK1–4. Pelajari kembali rangkuman Unit 1–4, kerjakan ulang latihan yang belum tuntas, dan latih kemampuan menganalisis kasus dengan kerangka nilai Pancasila, prinsip good governance, dan nilai antikorupsi. Kisi-kisi UTS disajikan pada Bab Asesmen Sumatif.

■ 5.5 Studi Kasus

Skenario di Kantor Kelurahan Harapan Jaya (kasus ilustrasi)

(1) Seorang staf meminta "uang rokok" agar surat keterangan usaha selesai hari itu juga. (2) Lurah menunjuk keponakannya sebagai penyedia makanan untuk setiap rapat tanpa pembandingan harga. (3) Seorang pengusaha mengirimkan parcel mewah kepada lurah menjelang pengurusan izin. (4) Laporan kegiatan pelatihan warga mencantumkan peserta yang sebenarnya tidak hadir.

Catatan: skenario disusun sebagai ilustrasi pembelajaran.

Pertanyaan analisis:

1. Identifikasi jenis perilaku koruptif pada setiap skenario beserta dasar normatifnya.
2. Gunakan teori GONE atau segitiga kecurangan untuk menjelaskan satu skenario.
3. Rancang tiga langkah pencegahan yang realistis bagi kelurahan tersebut.

■ 5.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 7 — Antikorupsi berbasis proyek

Luring (kelas)

- Dosen memaparkan kerangka hukum dan nilai antikorupsi (10 menit).
- Kelompok menganalisis satu skenario kasus perilaku koruptif secara mendalam; dosen berkeliling memberi umpan balik formatif.
- Kuis identifikasi kasus (5 skenario): jenis perilaku koruptif (40%), dasar normatif (30%), dan faktor penyebab (30%).

Daring (LMS)

- Tonton video tentang sembilan nilai antikorupsi dan bentuk-bentuk korupsi.
- Kelompok proyek menyusun **Laporan Analisis Kritis** untuk komunitas pilihan.

Luaran: Analisis skenario kelompok dan draf Laporan Analisis Kritis (final akhir Minggu 8).

■ 5.7 Rangkuman

- Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi; KPK mengelompokkan delik korupsi menjadi tujuh kelompok.
- Gratifikasi terkait jabatan wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja; nepotisme dilarang UU 28/1999.
- Plagiarisme, titip absen, joki, dan manipulasi data adalah perilaku koruptif di lingkungan akademik.
- Sembilan nilai antikorupsi: jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri.
- Pencegahan korupsi bekerja pada karakter individu dan perbaikan sistem, sebagaimana dijelaskan teori GONE, segitiga kecurangan, dan rumusan Klitgaard.

■ 5.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

1. Pemberian kepada pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak dilaporkan kepada KPK disebut ...
 - A. pemerasan
 - B. gratifikasi
 - C. penggelapan
 - D. perbuatan curang
2. Batas waktu melaporkan gratifikasi kepada KPK adalah ...
 - A. 7 hari kerja
 - B. 14 hari kerja
 - C. 30 hari kerja
 - D. 60 hari kerja
3. Lurah yang menunjuk keponakannya sebagai penyedia tanpa pembanding harga melakukan ...
 - A. nepotisme
 - B. pemerasan
 - C. plagiarisme
 - D. penggelapan
4. Faktor "exposure" dalam teori GONE berkaitan dengan ...
 - A. keserakahan pelaku
 - B. kebutuhan ekonomi
 - C. lemahnya pengungkapan dan sanksi
 - D. kesempatan karena sistem longgar
5. Nilai antikorupsi yang paling langsung dilanggar oleh plagiarisme adalah ...
 - A. sederhana
 - B. jujur
 - C. peduli
 - D. berani

B. Uraian

1. Identifikasi bentuk perilaku koruptif dan dasar normatifnya pada empat skenario Kelurahan Harapan Jaya.
2. Jelaskan faktor penyebab satu kasus perilaku koruptif di lingkungan akademik menggunakan segitiga kecurangan, lalu rancang dua langkah pencegahan.

■ 5.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 5.3 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Gratifikasi terkait jabatan yang tidak dilaporkan dianggap suap.
2	C	Pasal 12C UU 20/2001 menetapkan 30 hari kerja.
3	A	Menguntungkan keluarga di atas kepentingan masyarakat adalah nepotisme.
4	C	Exposure menyangkut kemungkinan diketahui dan beratnya sanksi.
5	B	Plagiarisme adalah ketidakjujuran akademik.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Jenis perilaku tepat untuk keempat skenario (skor maksimal 12).
- Dasar normatif relevan (skor maksimal 8).
- Penjelasan runtut (skor maksimal 5).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Tiga unsur segitiga kecurangan diterapkan tepat (skor maksimal 10).
- Langkah pencegahan spesifik dan realistis (skor maksimal 10).
- Argumen etis kuat (skor maksimal 5).

■ 5.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Kerjakan ulang analisis empat skenario dengan Tabel 5.1 dan 5.2, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Pelajari ketentuan pelaporan gratifikasi di situs resmi KPK dan buat infografis satu halaman untuk mahasiswa baru tentang cara menolak dan melaporkan gratifikasi.

■ 5.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Adakah kebiasaan "kecil" di sekitar Anda yang ternyata termasuk perilaku koruptif?
2. Nilai antikorupsi mana yang paling perlu Anda perkuat dalam diri sendiri?
3. Apa komitmen konkret Anda untuk menjaga integritas akademik selama kuliah?

NILAI ICHSA-N

Integrity: menolak segala bentuk ketidakjujuran akademik dan berani menegur secara santun; **Service:** memandang pencegahan korupsi sebagai pelayanan bagi kepentingan publik.

■ 5.12 Referensi Unit

Tim Penyusun. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbudristek RI.
 Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. KPK RI.
 Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Anti Korupsi*. LAN RI.
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press. (bacaan pengayaan)

5

BAB VI · UNIT 5 · MINGGU 9–10

Rencana Aksi Karakter Berbasis Komunitas

Dari analisis kesenjangan etika menuju rancangan aksi yang terukur, akuntabel, dan kontekstual

Sub-CPMK5

CPL-01 · CPL-10

Bobot 14%

CPMK3

6.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK5

Merancang strategi penerapan nilai-nilai integritas, antikorupsi, dan etika pemerintahan dalam konteks pelayanan publik lokal melalui penyusunan rencana aksi karakter berbasis komunitas.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menganalisis kesenjangan antara standar etika pemerintahan dan praktik pelayanan publik aktual di KTI menggunakan kerangka antikorupsi.
- Merumuskan minimal tiga strategi konkret penerapan nilai integritas dan antikorupsi dalam konteks pelayanan publik lokal.
- Merancang rencana aksi karakter yang memuat tujuan SMART, sasaran, strategi, anggaran estimatif, indikator keberhasilan, dan pihak penanggung jawab.
- Merancang mekanisme akuntabilitas yang mencegah potensi penyimpangan integritas selama pelaksanaan program.
- Menyesuaikan rancangan dengan kondisi sosial-budaya dan keterbatasan sumber daya komunitas di KTI.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK3	CPL-01 · CPL-10	14%	2 minggu (680 menit)

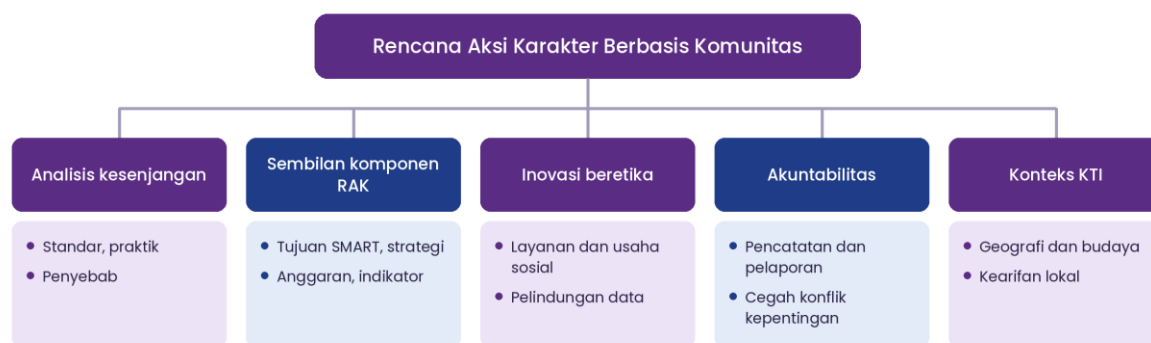
6.2 Pemantik

Mari memulai

Kelompok Anda telah memetakan nilai, mengevaluasi tata kelola, dan menemukan risiko koruptif di komunitas pilihan. Sekarang kepala desa atau kepala sekolah di komunitas itu bertanya: "Jadi, apa yang bisa kita lakukan mulai bulan depan, dengan dana dan orang yang terbatas?"

Tuliskan satu tindakan kecil yang menurut Anda paling mungkin dilakukan dan paling besar dampaknya.

6.3 Peta Konsep



Gambar 6.1 Peta konsep Unit 5

6.4 Uraian Materi

6.4.1 Analisis Kesenjangan Etika Pelayanan Publik

Rencana aksi yang baik lahir dari analisis kesenjangan yang tajam: apa **standar** yang seharusnya berlaku (nilai Pancasila, prinsip good governance, AUPB, nilai antikorupsi, standar pelayanan), apa **praktik** yang terjadi di komunitas, dan apa **penyebab** kesenjangan itu. Gunakan hasil Lembar Peta Nilai dan Laporan Analisis Kritis sebagai bahan utama.

Tabel 6.1 Contoh analisis kesenjangan (ilustrasi)

Standar	Praktik di komunitas	Penyebab	Arah aksi
Biaya layanan surat keterangan di kelurahan diumumkan terbuka dan tanpa pungutan	Warga sering diminta "uang rokok"	Tidak ada papan informasi; pengaduan tidak ditindaklanjuti	Transparansi biaya dan kanal pengaduan
Siswa mengerjakan tugas secara jujur	Budaya menyalin tugas dan titip absen	Tugas berulang; sanksi tidak konsisten	Kampanye integritas akademik dan pernyataan orisinalitas

6.4.2 Sembilan Komponen Rencana Aksi Karakter

Rencana Tugas RPS mensyaratkan RAK 9 komponen. Modul ini merumuskan kesembilan komponen tersebut sebagai berikut; setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas minimal dua komponen yang tercatat dalam logbook.

Tabel 6.2 Komponen Rencana Aksi Karakter (RAK)

No.	Komponen	Isi yang diharapkan
1	Profil komunitas dan masalah	Gambaran komunitas KTI dan masalah karakter, integritas, atau tata kelola berbasis analisis kesenjangan
2	Peta nilai	Nilai Pancasila, kearifan lokal, dan nilai ICHSA-N yang menjadi dasar aksi
3	Tujuan SMART	Tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu
4	Sasaran dan pemangku kepentingan	Kelompok sasaran, mitra, dan pihak yang berpengaruh

No.	Komponen	Isi yang diharapkan
5	Strategi dan kegiatan	Minimal tiga strategi konkret beserta kegiatannya
6	Jadwal	Tahapan pelaksanaan dan tenggat
7	Anggaran estimatif	Perkiraan biaya realistis dan sumber dana yang sah
8	Mekanisme akuntabilitas dan antikorupsi	Pencatatan, pelaporan, keterbukaan, pengaduan, dan pencegahan konflik kepentingan
9	Indikator dan monitoring-evaluasi	Indikator keberhasilan per strategi dan cara pemantauannya

6.4.3 Merumuskan Tujuan dan Strategi

Tujuan yang baik bersifat **SMART**. Bandingkan: "*Meningkatkan integritas pelayanan*" (terlalu umum) dengan "*Dalam tiga bulan, seluruh jenis layanan di Kantor Kelurahan X memiliki papan informasi persyaratan, waktu, dan biaya, dan jumlah pengaduan pungutan liar menurun*" (terukur dan terbatas waktu). Setiap strategi dihubungkan dengan penyebab kesenjangan: strategi yang menyasar karakter individu (misalnya pelatihan integritas) dilengkapi strategi yang memperbaiki sistem (misalnya transparansi dan kanal pengaduan), sesuai pelajaran dari Unit 4.

6.4.4 Inovasi Pelayanan dan Kewirausahaan Sosial yang Beretika

CPL-10 mendorong inovasi pelayanan publik dan layanan berbasis teknologi yang beretika. RAK dapat berbentuk inovasi sederhana, misalnya formulir pengaduan daring berbasis aplikasi percakapan, papan transparansi digital desa, atau usaha sosial yang keuntungannya membiayai kegiatan karakter komunitas. Semangat *reinventing government* (Osborne & Gaebler, 1992) diterapkan dengan syarat: inovasi tidak membuka celah korupsi baru, tidak memungut biaya di luar ketentuan, dan melindungi data pribadi warga sesuai UU 27/2022.

6.4.5 Merancang Mekanisme Akuntabilitas

Setiap rencana yang mengelola uang, jabatan, atau kewenangan membawa risiko penyimpangan. Karena itu, komponen kedelapan RAK wajib menjawab: siapa mencatat penggunaan dana, bagaimana laporan dibuka kepada komunitas, ke mana warga mengadu, bagaimana konflik kepentingan dicegah (misalnya anggota tim tidak boleh menjadi penyedia barang), dan kapan evaluasi dilakukan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari Unit 3 dan nilai antikorupsi dari Unit 4.

6.4.6 Kontekstualisasi di KTI

Rancangan harus sesuai dengan kondisi komunitas: jarak dan akses transportasi, ketersediaan internet, bahasa dan adat setempat, jadwal kegiatan warga (misalnya musim melaut atau panen), serta tokoh yang dihormati. Libatkan kearifan lokal dari Lembar Peta Nilai sebagai kekuatan, misalnya tradisi gotong royong sebagai cara menggerakkan warga.

■ 6.5 Studi Kasus

Draf RAK Kelompok Mentari (ilustrasi)

Kelompok Mentari memilih sebuah SMP di kecamatan kepulauan. Analisis mereka menemukan budaya menyalin tugas, titip absen, dan pungutan tidak resmi untuk kegiatan sekolah. Draf RAK mereka berisi tiga strategi: pelatihan integritas untuk siswa, "pojok kejujuran" di kantin, dan kotak saran. Tujuan ditulis

"membentuk siswa yang jujur". Anggaran disebut "disesuaikan", dan tidak ada penjelasan siapa yang mengelola dana.

Catatan: kasus ini disusun sebagai ilustrasi pembelajaran.

Pertanyaan analisis:

1. Komponen RAK mana yang masih lemah atau belum ada?
2. Tulis ulang tujuan kelompok ini menjadi tujuan SMART.
3. Rancang mekanisme akuntabilitas untuk pengelolaan dana kegiatan dan pungutan sekolah.

■ 6.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 9 — Analisis kesenjangan dan kerangka rencana aksi

Luring (kelas)

- Dosen menyintesis temuan forum daring (20 menit), lalu memandu lokakarya kelompok (50 menit).
- Setiap kelompok mempresentasikan draf kerangka rencana aksi dalam format poster sederhana dan merevisinya berdasarkan umpan balik.

Daring (LMS)

- Tonton video pengantar tentang inovasi pelayanan publik berbasis nilai karakter bangsa dan baca dua studi kasus pelayanan publik di KTI.
- Tanggapi pertanyaan pemantik di forum dengan merujuk minimal satu pustaka dan unduh templat kerangka rencana aksi.

Luaran: **Draf kerangka rencana aksi** kelompok (maksimal 500 kata): masalah etika, tiga strategi terukur, dan satu indikator per strategi.

Minggu 10 — Presentasi rancangan RAK

Luring (kelas)

- Setiap kelompok mempresentasikan rancangan RAK (10 menit) diikuti tanya jawab (5 menit).
- Dosen menilai dengan rubrik dan memfasilitasi pleno singkat (15 menit) untuk menyintesis pembelajaran dari seluruh rancangan.

Daring (LMS)

- Lengkapi rancangan menjadi sembilan komponen dan unggah ke LMS.
- Isi logbook kontribusi individu.

Luaran: **Rancangan RAK** tertulis dan presentasi kelompok.

■ 6.7 Rangkuman

- RAK dimulai dari analisis kesenjangan antara standar, praktik, dan penyebabnya.
- RAK memuat sembilan komponen, termasuk tujuan SMART, anggaran estimatif, mekanisme akuntabilitas, dan indikator monitoring-evaluasi.
- Strategi yang efektif menyasar karakter individu sekaligus perbaikan sistem.
- Inovasi pelayanan dan kewirausahaan sosial harus beretika, tidak membuka celah korupsi, dan melindungi data pribadi.
- Rancangan disesuaikan dengan kondisi geografis, budaya, dan sumber daya komunitas di KTI.

■ 6.8 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri. Bagian A terdiri atas 5 soal pilihan ganda (skor 10 per soal); Bagian B terdiri atas 2 soal uraian (skor 25 per soal). Skor maksimum 100.

A. Pilihan Ganda

- Analisis kesenjangan dalam penyusunan RAK membandingkan ...
 - anggaran tahun lalu dan tahun ini
 - standar yang seharusnya, praktik yang terjadi, dan penyebabnya
 - pendapat dosen dan mahasiswa
 - jumlah anggota kelompok
- Tujuan berikut yang paling memenuhi kriteria SMART adalah ...
 - Membentuk warga yang berkarakter
 - Meningkatkan kejujuran siswa
 - Dalam tiga bulan seluruh layanan kelurahan memiliki papan informasi biaya dan waktu layanan
 - Memberantas korupsi di desa
- Komponen RAK yang mengatur pencatatan dana, keterbukaan laporan, dan pencegahan konflik kepentingan adalah ...
 - peta nilai
 - mekanisme akuntabilitas dan antikorupsi
 - jadwal
 - profil komunitas
- Inovasi layanan pengaduan daring dalam RAK wajib memperhatikan ...
 - keuntungan pribadi pengelola
 - perlindungan data pribadi warga
 - jumlah pengikut media sosial
 - kesamaan dengan program daerah lain
- Menyertakan tradisi gotong royong setempat dalam strategi RAK adalah wujud ...
 - kontekstualisasi dengan kearifan lokal
 - penyimpangan dari Pancasila
 - pemborosan anggaran
 - nepotisme

B. Uraian

- Susun analisis kesenjangan untuk satu masalah pelayanan publik di komunitas KTI pilihan kelompok Anda, lalu rumuskan satu tujuan SMART dan tiga strategi.
- Rancang mekanisme akuntabilitas dan antikorupsi untuk RAK kelompok Anda. Jelaskan bagaimana mekanisme itu mencegah minimal dua risiko penyimpangan.

■ 6.9 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

Tabel 6.3 Kunci jawaban pilihan ganda

No.	Kunci	Pembahasan singkat
1	B	Analisis kesenjangan menghubungkan standar, praktik, dan penyebab.
2	C	Pilihan C spesifik, terukur, dan berbatas waktu.

No.	Kunci	Pembahasan singkat
3	B	Komponen kedelapan RAK mengatur akuntabilitas dan antikorupsi.
4	B	Data warga dilindungi sesuai UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
5	A	Kearifan lokal menjadi kekuatan dalam kontekstualisasi rancangan.

Pedoman soal uraian nomor 1

- Standar, praktik, dan penyebab dianalisis dengan tepat (skor maksimal 10).
- Tujuan memenuhi kriteria SMART (skor maksimal 7).
- Tiga strategi konkret dan terhubung dengan penyebab (skor maksimal 8).

Pedoman soal uraian nomor 2

- Unsur pencatatan, pelaporan, pengaduan, dan pencegahan konflik kepentingan lengkap (skor maksimal 12).
- Dua risiko penyimpangan dan cara pencegahannya dijelaskan (skor maksimal 8).
- Rancangan realistis bagi komunitas KTI (skor maksimal 5).

■ 6.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Perbaiki draf RAK Kelompok Mentari menggunakan Tabel 6.2, lalu kerjakan kembali soal yang salah.
≥ 90% (pengayaan)	Kembangkan satu strategi RAK menjadi prototipe sederhana (misalnya formulir pengaduan daring atau poster transparansi) dan uji coba pada dua orang anggota komunitas.

■ 6.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Komponen RAK mana yang menjadi tanggung jawab Anda, dan apa tantangannya?
2. Bagaimana kelompok memastikan rancangan benar-benar sesuai kebutuhan komunitas, bukan asumsi kelompok?
3. Nilai ICHSA-N mana yang paling Anda rasakan dalam kerja kelompok minggu ini?

NILAI ICHSA-N

Service dan **Adaptability**: merancang aksi yang berorientasi pada kebutuhan nyata komunitas dan menyesuakannya dengan kondisi lokal; **Creativity**: menghadirkan inovasi yang tetap beretika.

■ 6.12 Referensi Unit

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (Edisi Revisi). KPK RI.

- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan yang Baik*. Mandar Maju.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Akuntabilitas*. LAN RI.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

6

BAB VII · UNIT 6 · MINGGU 11–13

Esai Ilmiah Reflektif-Argumentatif

Mengintegrasikan seluruh nilai karakter bangsa dalam argumen tertulis dan refleksi personal

Sub-CPMK6

CPL-01 · CPL-10

Bobot 22%

CPMK3

■ 7.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK6

Mengintegrasikan seluruh nilai karakter bangsa (Pancasila, integritas kebangsaan, etika pemerintahan, dan antikorupsi) ke dalam produk reflektif-argumentatif berupa esai ilmiah dan presentasi akhir yang menunjukkan internalisasi nilai ICHSA-N.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Menyintesis konsep Pancasila, integritas kebangsaan, etika pemerintahan, dan antikorupsi ke dalam argumen esai yang koheren.
- Menggunakan kerangka etika Pancasila untuk mengevaluasi satu kasus degradasi nilai kebangsaan yang dipilih secara mandiri.
- Mengonstruksi refleksi personal yang menghubungkan pengalaman belajar dan kontribusi pada RAK dengan internalisasi nilai ICHSA-N.
- Mempresentasikan esai secara lisan dan mengevaluasi presentasi rekan menggunakan lembar penilaian sejawat.
- Menunjukkan kejujuran akademik dengan sitasi yang benar dan pernyataan orisinalitas.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK3	CPL-01 · CPL-10	22%	3 minggu (1.020 menit)

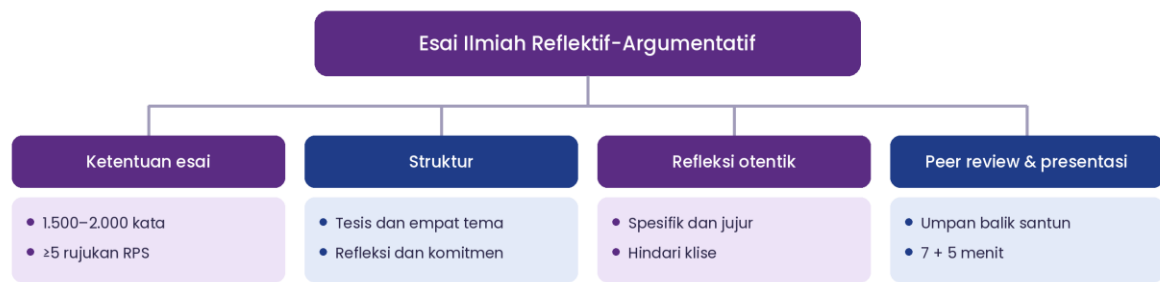
■ 7.2 Pemantik

Mari memulai

Bacalah dua kalimat berikut. (A) "Sebagai generasi muda, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila demi kemajuan bangsa." (B) "Saat menyusun anggaran RAK, saya hampir menuliskan harga lebih tinggi agar kelompok punya dana cadangan, sampai saya sadar bahwa itulah awal dari praktik yang kami kritik di Unit 4."

Kalimat mana yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih menunjukkan internalisasi nilai? Mengapa?

■ 7.3 Peta Konsep



Gambar 7.1 Peta konsep Unit 6

■ 7.4 Uraian Materi

7.4.1 Esai Reflektif-Argumentatif

Esai dalam mata kuliah ini memadukan dua hal. Sebagai **esai argumentatif**, ia memiliki satu tesis yang dipertahankan dengan alasan dan bukti. Sebagai **esai reflektif**, ia memuat pengalaman personal yang dianalisis, bukan sekadar diceritakan. Ukuran keberhasilannya bukan indahnya kalimat tentang Pancasila, melainkan kejujuran dan kedalaman penalaran tentang bagaimana nilai-nilai itu bekerja, dan diuji, dalam pengalaman nyata penulis.

Tabel 7.1 Ketentuan esai ilmiah individual

Aspek	Ketentuan
Panjang	1.500–2.000 kata
Format	Times New Roman 12 pt, spasi 1,5, margin 3-3-3-3 cm
Rujukan	Minimal lima rujukan dari daftar pustaka RPS, format APA edisi ke-7
Orisinalitas	Karya individual; kemiripan teks lebih dari 20% antaranggota dinyatakan tidak lulus komponen esai; wajib pernyataan orisinalitas dan sitasi GenAI bila digunakan
Tema wajib	Pancasila, identitas kebangsaan, good governance, dan antikorupsi

7.4.2 Struktur Esai

- 1. Pendahuluan dan tesis.** Buka dengan pengalaman atau kasus yang konkret, lalu nyatakan tesis dalam satu kalimat: posisi Anda tentang tantangan karakter bangsa yang dikaji.
- 2. Pembahasan berlapis.** Kembangkan tesis melalui empat lapis tema: nilai Pancasila, identitas kebangsaan, good governance, dan antikorupsi. Setiap paragraf memuat klaim, bukti (dari kasus dan pustaka), dan penalaran.
- 3. Analisis kasus dengan etika Pancasila.** Evaluasi satu kasus degradasi nilai kebangsaan yang Anda pilih, menggunakan lima langkah dari Unit 1.
- 4. Refleksi personal.** Analisis pengalaman Anda selama semester, termasuk kontribusi pada RAK, dengan pola *apa yang terjadi – mengapa itu penting – apa yang akan saya lakukan*.
- 5. Simpulan dan komitmen.** Tegaskan kembali tesis dan rumuskan komitmen yang konkret dan terukur.

7.4.3 Menghindari Refleksi yang Klise

Rencana Tugas RPS menuntut internalisasi nilai ICHSA-N yang **konkret dan tidak klise**. Refleksi menjadi klise ketika hanya berisi pernyataan umum ("saya menjadi lebih cinta tanah air"). Refleksi menjadi kuat ketika menunjukkan momen spesifik, konflik batin, keputusan yang diambil, dan

perubahan cara berpikir, disertai alasan. Kejujuran tentang kegagalan atau keraguan justru menunjukkan kedalaman refleksi.

7.4.4 Peer Review dan Presentasi Esai

Draf esai ditinjau sejawat dengan fokus pada kejelasan tesis, kedalaman sintesis lintas bahan kajian, koherensi argumen, dan kualitas refleksi. Umpan balik yang baik bersifat spesifik ("paragraf ketiga belum menunjukkan bukti") dan santun. Pada presentasi esai, setiap mahasiswa memaparkan tesis, argumen utama, dan refleksinya selama 7 menit, lalu menjawab pertanyaan dosen dan dua penyanggah selama 5 menit.

■ 7.5 Studi Kasus

Dua paragraf refleksi (ilustrasi)

Paragraf A: *"Selama kuliah ini saya belajar banyak tentang Pancasila dan antikorupsi. Saya sadar bahwa nilai-nilai tersebut sangat penting dan saya berjanji akan selalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari."*

Paragraf B: *"Ketika mewawancarai petugas kelurahan untuk Laporan Analisis Kritis, saya menyadari bahwa 'uang rokok' yang selama ini saya anggap biasa ternyata membebani warga miskin. Pengalaman itu mengubah cara saya memandang pungutan kecil: bukan sekadar kebiasaan, melainkan pelanggaran sila kelima. Karena itu, dalam RAK saya menulis komponen transparansi biaya, dan sebagai pribadi saya berkomitmen tidak lagi memberi imbalan untuk mempercepat layanan."*

Pertanyaan analisis:

1. Mengapa Paragraf B lebih kuat sebagai refleksi?
2. Tunjukkan unsur klaim, bukti, dan penalaran dalam Paragraf B.
3. Tulis ulang Paragraf A berdasarkan pengalaman Anda sendiri.

■ 7.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 11 — Draf esai dan peer review

Luring (kelas)

- Dosen membahas pola kelemahan argumen dari hasil *peer review* (30 menit).
- Klinik penulisan kelompok kecil (40 menit): mahasiswa merevisi draf berdasarkan umpan balik.

Daring (LMS)

- Unggah draf esai dan berikan umpan balik tertulis kepada minimal satu rekan dengan lembar *peer review*.
- Kelompok berkonsultasi dengan dosen tentang draf RAK.

Luaran: Draf esai ilmiah dan umpan balik tertulis untuk rekan.

Minggu 12 — Penyempurnaan dan presentasi esai (tahap 1)

Luring (kelas)

- Presentasi esai individual atau panel kecil (7 menit paparan, 5 menit tanya jawab) di ruang seminar.
- Mahasiswa menilai presentasi rekan dengan lembar penilaian sejawat.

Daring (LMS)

- Revisi esai berdasarkan klinik penulisan.

- Kelompok merevisi RAK berdasarkan umpan balik presentasi Minggu 10.

Luaran: Esai versi presentasi dan lembar penilaian sejawat.

Minggu 13 — Presentasi esai (tahap 2)

Luring (kelas)

- Presentasi esai bagi mahasiswa yang belum tampil; setiap presentasi ditanggapi dua penyanggah terpilih.
- Dosen memberi umpan balik formatif berdasarkan rubrik ICHSA-N.

Daring (LMS)

- Tulis catatan revisi akhir esai; versi final dikumpulkan bersama tagihan akhir pada Minggu 15.

Luaran: Presentasi esai dan catatan revisi akhir.

■ 7.7 Rangkuman

- Esai reflektif-argumentatif memadukan tesis yang dipertahankan dengan bukti dan refleksi personal yang dianalisis.
- Esai individual berpanjang 1.500–2.000 kata, memakai minimal lima rujukan RPS, dan memenuhi ketentuan orisinalitas.
- Struktur esai: pendahuluan dan tesis, pembahasan empat tema, analisis kasus dengan etika Pancasila, refleksi personal, serta simpulan dan komitmen.
- Refleksi yang kuat bersifat spesifik, jujur, dan menunjukkan perubahan cara berpikir; refleksi klise hanya berisi pernyataan umum.
- Peer review dan presentasi esai melatih kemampuan menilai dan mempertahankan argumen etis.

■ 7.8 Latihan: Swa-Nilai Draf Esai

Nilai draf esai Anda dengan daftar periksa berikut. Beri skor 0 (belum), 1 (sebagian), atau 2 (sudah baik). Skor maksimum 20; tingkat penguasaan = $(\text{jumlah skor} \div 20) \times 100\%$.

Tabel 7.2 Daftar periksa esai

No.	Butir periksa	Skor (0–2)
1	Tesis dinyatakan jelas dalam satu kalimat di pendahuluan.	
2	Keempat tema (Pancasila, identitas kebangsaan, good governance, antikorupsi) dibahas dan saling terhubung.	
3	Setiap paragraf pembahasan memuat klaim, bukti, dan penalaran.	
4	Satu kasus degradasi nilai dianalisis dengan lima langkah etika Pancasila.	
5	Refleksi memuat momen spesifik dan perubahan cara berpikir.	
6	Kontribusi pribadi pada RAK dijelaskan secara jujur.	
7	Komitmen di akhir konkret dan terukur.	
8	Minimal lima rujukan RPS dikutip dengan format APA 7.	
9	Panjang dan format sesuai ketentuan.	

No.	Butir periksa	Skor (0–2)
10	Pernyataan orisinalitas dan sitasi GenAI (bila ada) dilampirkan.	
	Jumlah	

■ 7.9 Rubrik Esai dan Presentasi Esai

Kriteria berikut dijabarkan dari RPS (Minggu 12–13 dan Rencana Tugas). Bobot esai merupakan usulan modul dan dapat disesuaikan dosen pengampu.

Tabel 7.3 Rubrik esai ilmiah individual

Kriteria (bobot)	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Kualitas tesis dan argumen (25%)	Tesis tajam, argumen logis dan terbukti	Tesis jelas, argumen memadai	Tesis kabur	Tanpa tesis
Kedalaman sintesis lintas nilai (25%)	Empat tema terintegrasi dengan benang merah kuat	Empat tema dibahas, keterkaitan cukup	Tema dibahas terpisah	Tema tidak lengkap
Orisinalitas refleksi (20%)	Spesifik, jujur, menunjukkan perubahan	Cukup spesifik	Cenderung umum	Klise
Ketepatan rujukan (15%)	≥5 rujukan RPS, APA 7 konsisten	≥5 rujukan, sedikit kesalahan format	<5 rujukan	Tanpa rujukan
Konsistensi nilai ICHSA-N (15%)	Nilai tampak konkret dalam argumen dan komitmen	Tampak cukup jelas	Disebut tanpa bukti	Tidak tampak

Tabel 7.4 Rubrik presentasi esai lisan

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Struktur penyampaian	Runtut dari tesis hingga komitmen	Runtut	Kurang runtut	Tidak terstruktur
Kualitas argumentasi etis	Berpijak pada Pancasila dan antikorupsi secara tajam	Memadai	Dangkal	Tidak etis atau keliru
Respons terhadap pertanyaan	Tepat, jujur, meyakinkan	Memadai	Sebagian	Tidak mampu
Penampilan dan internalisasi karakter	Percaya diri, santun, otentik	Baik	Kurang meyakinkan	Tidak siap

■ 7.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Perbaiki butir daftar Periksa yang bernilai 0 atau 1, konsultasikan draf kepada dosen, lalu lakukan swa-nilai ulang.
≥ 90% (pengayaan)	Kirimkan ringkasan esai (500 kata) ke media kampus atau blog resmi program studi setelah disetujui dosen.

■ 7.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Bagian esai mana yang paling sulit ditulis secara jujur?
2. Umpan balik sejawat mana yang paling mengubah esai Anda?
3. Apa perbedaan antara mengetahui nilai dan menghayati nilai menurut pengalaman Anda semester ini?

NILAI ICHSA-N

Integrity dan Nationalism: menulis refleksi yang jujur dan orisinal, serta menempatkan komitmen pribadi dalam kerangka pengabdian kepada bangsa; **Harmony:** memberi umpan balik sejawat yang santun dan membangun.

■ 7.12 Referensi Unit

- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila* (Edisi Revisi). Paradigma.
- Lickona, T. (2009). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (Edisi Revisi). KPK RI.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan yang Baik*. Mandar Maju.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Nasionalisme*. LAN RI.

7

BAB VIII · UNIT 7 · MINGGU 14–15

Presentasi Kolaboratif dan Penyempurnaan Proposal

Mempertahankan Rencana Aksi Karakter di hadapan audiens dan menyempurnakannya berdasarkan umpan balik

Sub-CPMK7

CPL-01 · CPL-10

Bobot 14%

CPMK3

■ 8.1 Capaian Pembelajaran Unit

Sub-CPMK7

Mempresentasikan dan mempertahankan proposal inisiatif berbasis karakter bangsa secara kolaboratif di hadapan audiens dengan mengintegrasikan umpan balik untuk penyempurnaan akhir.

Indikator capaian — mahasiswa mampu:

- Mempresentasikan proposal inisiatif berbasis karakter bangsa secara kolaboratif dengan pembagian peran yang jelas dan penyampaian yang runut.
- Mempertahankan rasionalitas desain inisiatif dengan argumen berbasis nilai Pancasila dan bukti konteks lokal KTI.
- Mengidentifikasi kelemahan proposal secara terbuka dan mengintegrasikan umpan balik ke dalam catatan revisi yang spesifik.
- Menilai kelayakan implementasi inisiatif melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan konteks lokal.
- Menyajikan proposal final yang memenuhi standar penulisan akademis dengan struktur lengkap.

CPMK	CPL yang didukung	Bobot Sub-CPMK	Estimasi Waktu
CPMK3	CPL-01 · CPL-10	14%	2 minggu (680 menit)

■ 8.2 Pemantik

Mari memulai

Seorang reviewer tamu, tokoh masyarakat dari komunitas yang Anda kaji, bertanya: "Rencana ini bagus di atas kertas. Tapi mengapa warga kami harus percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan, dan siapa yang akan melanjutkannya setelah kalian lulus?"

Bagaimana kelompok Anda akan menjawab? Siapa di antara anggota yang paling siap menjawab, dan mengapa?

■ 8.3 Peta Konsep



Gambar 8.1 Peta konsep Unit 7

■ 8.4 Uraian Materi

8.4.1 Presentasi Kolaboratif yang Meyakinkan

Presentasi RAK berlangsung 12 menit dengan tanya jawab 8 menit. Susun alur: (1) komunitas dan masalahnya; (2) nilai yang menjadi dasar; (3) tujuan dan strategi; (4) mekanisme akuntabilitas; (5) indikator dan keberlanjutan; (6) ajakan kepada audiens. Gunakan 10–12 slide dengan prinsip satu slide satu gagasan. Setiap anggota tampil dan siap menjawab pertanyaan tentang bagian mana pun; pembagian peran dicatat dalam logbook.

8.4.2 Mempertahankan Argumen dengan Jujur

Pertahankan rancangan dengan argumen berbasis nilai dan bukti konteks lokal, bukan dengan menutupi kelemahan. Jika penanya menemukan celah yang sah, akui dengan jujur, jelaskan bagaimana kelompok akan memperbaikinya, dan catat sebagai bahan revisi. Kejujuran intelektual adalah bagian dari kriteria penilaian.

8.4.3 Catatan Revisi yang Terstruktur

Tabel 8.1 Format catatan revisi

No.	Masukan (sumber)	Bagian RAK terkait	Tindakan revisi	Status
1	...	...	...	Selesai / sebagian / tidak diterapkan (alasan)
2	...	...	...	...

8.4.4 Menilai Kelayakan: Analisis SWOT

Sebelum finalisasi, nilai kelayakan RAK dengan analisis **SWOT**: kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) internal rancangan, serta peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) dari lingkungan komunitas. Gunakan hasilnya untuk memperkuat strategi, menyesuaikan indikator agar realistis sesuai kapasitas komunitas, dan merencanakan keberlanjutan, misalnya dengan menyerahkan pengelolaan kepada karang taruna, komite sekolah, atau perangkat desa.

8.4.5 Proposal Final dan Sidang Karakter

Proposal final memuat sembilan komponen RAK (Tabel 6.2) ditambah analisis konteks lokal KTI, analisis SWOT, catatan revisi, logbook kontribusi, dan daftar pustaka. Pada Minggu 15, kelompok

mempertahankan RAK dalam **sidang karakter** di hadapan dosen dan satu reviewer tamu, praktisi pemerintahan atau tokoh masyarakat lokal KTI. Rekaman video presentasi diunggah ke LMS, dan esai individual final dikumpulkan pada hari yang sama.

■ 8.5 Studi Kasus

Catatan panel untuk Kelompok Samudra (ilustrasi)

Kelompok Samudra mempresentasikan RAK "Desa Tanpa Pungli" untuk sebuah desa pesisir. Panel memberi tiga masukan: (1) indikator "pungli berkurang" tidak jelas cara mengukurnya; (2) kanal pengaduan hanya melalui aplikasi, padahal banyak warga lanjut usia tidak memiliki telepon pintar; (3) belum jelas siapa yang melanjutkan program setelah semester berakhir. Salah satu anggota menjawab defensif bahwa semua itu "akan dipikirkan nanti".

Pertanyaan analisis:

1. Susun catatan revisi untuk ketiga masukan menggunakan Tabel 8.1.
2. Bagaimana seharusnya anggota kelompok merespons masukan panel?
3. Gunakan analisis SWOT singkat untuk menilai kelayakan RAK tersebut.

■ 8.6 Aktivitas Pembelajaran

Minggu 14 — Presentasi panel dan simulasi pitching

Luring (kelas)

- Setiap tim mempresentasikan RAK (12 menit) dan menjawab pertanyaan (8 menit) dari dosen serta dua tim penyanggah terjadwal.
- Dosen mencatat poin umpan balik kunci di papan agar seluruh kelas belajar dari setiap presentasi.

Daring (LMS)

- Finalisasi slide (10–12) dan lakukan simulasi *pitching* antarkelompok dengan *peer review* terstruktur.
- Susun catatan revisi berdasarkan seluruh masukan.

Luaran: Presentasi RAK dan catatan revisi terstruktur.

Minggu 15 — Sidang karakter dan refleksi penutup

Luring (kelas)

- Sidang karakter: kelompok mempertahankan RAK final di hadapan dosen dan reviewer tamu.
- Dosen memfasilitasi refleksi penutup tentang perjalanan belajar karakter bangsa dari Minggu 1 hingga 15.

Daring (LMS)

- Unggah RAK final, esai individual final, logbook, dan rekaman video presentasi ke LMS.

Luaran: RAK final, rekaman video, logbook, dan esai individual final.

■ 8.7 Rangkuman

- Presentasi kolaboratif menuntut alur yang jelas, pembagian peran yang tercatat, dan kesiapan setiap anggota menjawab pertanyaan.
- Argumen dipertahankan dengan jujur; celah yang sah diakui dan dijadikan bahan revisi.
- Catatan revisi menunjukkan bagaimana setiap masukan ditindaklanjuti.

- Analisis SWOT membantu menilai kelayakan dan merencanakan keberlanjutan RAK.
- Proposal final dipertahankan dalam sidang karakter bersama reviewer tamu dari praktisi atau tokoh masyarakat KTI.

■ 8.8 Latihan: Swa-Nilai Kesiapan Sidang Karakter

Beri skor 0 (belum), 1 (sebagian), atau 2 (sudah baik) untuk setiap butir. Skor maksimum 20; tingkat penguasaan = $(\text{jumlah skor} \div 20) \times 100\%$.

Tabel 8.2 Daftar periksa kesiapan

No.	Butir periksa	Skor (0–2)
1	Sembilan komponen RAK lengkap dan saling konsisten.	
2	Tujuan dan indikator memenuhi kriteria SMART.	
3	Mekanisme akuntabilitas dan antikorupsi jelas dan realistis.	
4	Analisis konteks lokal dan SWOT tersedia.	
5	Semua masukan Minggu 14 tercatat dan ditindaklanjuti.	
6	Slide 10–12 halaman, ringkas, dan bersumber.	
7	Pembagian peran presentasi jelas dan tercatat di logbook.	
8	Setiap anggota siap menjawab pertanyaan tentang seluruh RAK.	
9	Rencana keberlanjutan program dijelaskan.	
10	Esai individual final dan rekaman video siap diunggah.	
	Jumlah	

■ 8.9 Rubrik Final Project

Kriteria dan bobot berikut diambil dari Rencana Tugas Mahasiswa RPS. Pembagiannya ke komponen Proyek Rencana Aksi dan UAS dijelaskan pada Bab Asesmen Sumatif.

Tabel 8.3 Rubrik final project

Kriteria (bobot)	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
a. Lembar Peta Nilai (15%)	≥3 nilai sila dan kearifan lokal spesifik, berbasis fakta	Spesifik dengan sedikit generalisasi	Cenderung generik	Tidak relevan
b. Laporan Analisis Kritis (20%)	≥4 prinsip GG dan ≥3 bentuk perilaku koruptif, berbasis data terverifikasi	Memenuhi jumlah, bukti cukup	Kurang dari ketentuan	Tidak terstruktur
c. Kelengkapan dan kelayakan RAK (25%)	9 komponen lengkap, SMART, kontekstual, logbook merata	Lengkap dengan sedikit kelemahan	Komponen kurang atau tidak realistis	Tidak lengkap

Kriteria (bobot)	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
d. Esai ilmiah individual (25%)	Lihat Tabel 7.3 (skor sangat baik)	Tabel 7.3 (baik)	Tabel 7.3 (cukup)	Tabel 7.3 (kurang)
e. Presentasi akhir dan mempertahankan argumen (15%)	Sistematis, percaya diri, jawaban jujur dan mendalam	Jelas dan memadai	Kurang jelas	Tidak mampu mempertahankan

Persiapan UAS (Minggu 16)

UAS mengukur Sub-CPMK5–7. Pastikan RAK final, esai individual final, logbook, dan rekaman video telah diunggah, serta setiap anggota siap mempertanggungjawabkan kontribusinya. Ketentuan lengkap UAS disajikan pada Bab Asesmen Sumatif.

8.10 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Hitung tingkat penguasaan dengan rumus pada Subbab 1.8. Jika tingkat penguasaan Anda **70% atau lebih**, lanjutkan ke unit berikutnya. Jika kurang dari 70%, lakukan remedial berikut sebelum melanjutkan.

Kondisi	Tindak lanjut
< 70% (remedial)	Perbaiki butir daftar periksa yang bernilai 0 atau 1 dan konsultasikan catatan revisi kepada dosen sebelum sidang karakter.
≥ 90% (pengayaan)	Presentasikan RAK kepada pengelola komunitas yang dikaji (dengan pendampingan dosen) dan catat tanggapan mereka sebagai bahan tindak lanjut.

8.11 Refleksi dan Nilai ICHSA-N

Refleksi diri

1. Pertanyaan apa yang paling menantang saat presentasi, dan bagaimana Anda menjawabnya?
2. Masukan mana yang paling memperbaiki RAK kelompok?
3. Apa arti mata kuliah ini bagi cara Anda memandang peran sebagai calon aparatur atau pemimpin lokal?

NILAI ICHSA-N

Integrity, Harmony, dan Service: mempertahankan argumen secara jujur, bekerja sama secara setara dalam tim, dan menempatkan kepentingan komunitas sebagai tujuan akhir.

8.12 Referensi Unit

- Lickona, T. (2009). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (Edisi Revisi). KPK RI.

Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila* (Edisi Revisi). Paradigma.

BAB IX · ASESMEN SUMATIF

Asesmen Sumatif dan Integrasi Penilaian

Peta penilaian, kisi-kisi UTS dan UAS, rubrik, dan pengukuran ketercapaian CPMK serta CPL

■ 9.1 Prinsip Asesmen

Asesmen mata kuliah ini dirancang agar mengukur bukan hanya pengetahuan tentang nilai, tetapi juga kemampuan menganalisis dan mewujudkannya dalam tindakan. Setiap instrumen mengukur Sub-CPMK tertentu, kriterianya diumumkan sejak awal, dan nilainya dicatat per Sub-CPMK di SI-OBE. Asesmen bersifat **otentik** (komunitas dan kasus nyata), **berkelanjutan** (formatif dan sumatif), **transparan**, dan **berintegritas**: kejujuran akademik adalah bagian dari yang dinilai.

■ 9.2 Peta Komponen Penilaian dan Sub-CPMK

Sesuai desain RPS, **bobot komponen** (Tabel 1.10) menentukan nilai akhir, sedangkan **bobot Sub-CPMK** (Tabel 1.6) menentukan ketercapaian CPL. Tabel berikut mengikuti pemetaan pada Bagian 3.1 dan 3.6 RPS.

Tabel 9.1 Peta komponen penilaian dan Sub-CPMK

Komponen (bobot)	SC1	SC2	SC3	SC4	SC5	SC6	SC7
Tugas Analisis Kasus (10%)	✓	✓	✓				
Kuis (10%)	✓	✓					
UTS (20%)	✓	✓	✓	✓			
Proyek Rencana Aksi (40%)				✓	✓	✓	
UAS (20%)					✓	✓	✓

9.2.1 Pembagian Kriteria Final Project ke Komponen

Rubrik final project (Tabel 8.3) memuat lima kriteria. Agar esai tidak dinilai dua kali, kriteria dibagi sebagai berikut.

Tabel 9.2 Pembagian kriteria final project

Komponen	Kriteria yang dinilai	Cara menghitung	Sub-CPMK utama
Proyek Rencana Aksi (40%)	a. Lembar Peta Nilai; b. Laporan Analisis Kritis; c. RAK; e. Presentasi kelompok	$(15a + 20b + 25c + 15e) \div 75$	SC4 (b), SC5 (a, c), SC6 (e)
UAS (20%)	d. Esai ilmiah final; pertanggungjawaban individu dalam sidang karakter	$60\% \text{ esai} + 40\% \text{ sidang individu}$	SC5, SC6, SC7

9.2.2 Perhitungan Nilai Akhir dan Ketercapaian

1. **Nilai akhir** = $\Sigma (\text{nilai komponen} \times \text{bobot komponen}) \div 100$.

2. **Nilai Sub-CPMK** = rata-rata skor butir atau kriteria yang mengukur Sub-CPMK tersebut (misalnya butir UTS per Sub-CPMK, kriteria final project per Sub-CPMK).
3. **Ketercapaian CPL** = rata-rata tertimbang nilai Sub-CPMK dengan bobot pada kolom CPL di Tabel 1.6.

Tabel 9.3 Contoh perhitungan untuk seorang mahasiswa (data ilustrasi, disederhanakan)

Komponen	Analisis Kasus	Kuis	UTS	Proyek	UAS
Nilai (0–100)	80	75	72	82	78

Sub-CPMK	1	2	3	4	5	6	7
Nilai	75,67	75,67	76,00	77,00	80,00	80,00	78,00

Hasil	Nilai
Nilai akhir	78,30 (huruf B)
Ketercapaian CPL-01	77,11
Ketercapaian CPL-10	79,44

Contoh ini memakai rata-rata sederhana nilai komponen. Dalam praktik, gunakan skor per butir atau per kriteria agar nilai Sub-CPMK lebih akurat. Ambang ketercapaian adalah 70; bila kurang dari 75% mahasiswa mencapai ambang pada suatu CPL, dilakukan intervensi berupa remedial, pengayaan, asistensi, atau revisi metode dan asesmen.

■ 9.3 Kisi-Kisi dan Contoh Naskah UTS

UTS dilaksanakan pada Minggu 8 berupa tes tertulis esai analitis selama 100 menit, mencakup Sub-CPMK1–4. Skor soal proporsional terhadap bobot Sub-CPMK pra-UTS (15 : 14 : 14 : 7).

Tabel 9.4 Kisi-kisi UTS

No.	Sub-CPMK	Indikator yang diukur	Level	Skor
1	Sub-CPMK1	Menjelaskan tingkatan nilai Pancasila dan konsep karakter bangsa	C2	15
2	Sub-CPMK1	Menganalisis penguatan dan penyimpangan nilai Pancasila dalam kasus	C4	15
3	Sub-CPMK2	Menganalisis unsur identitas nasional dan ekspresi kebangsaan lokal dalam kasus	C4	28
4	Sub-CPMK3	Mengevaluasi tata kelola dalam kasus dengan prinsip good governance dan AUPB	C5	28
5	Sub-CPMK4	Mengidentifikasi bentuk perilaku koruptif, dasar normatif, dan faktor penyebabnya	C4	14
			Jumlah	100

Contoh naskah UTS — Kabupaten Teluk Damai (ilustrasi)

Menyambut hari jadinya, Kabupaten Teluk Damai menggelar festival budaya yang menampilkan tradisi gotong royong dari berbagai suku dan doa bersama lintas agama. Pada saat yang sama, warga mengeluhkan pungutan tidak resmi dalam pengurusan KTP di beberapa kecamatan, sementara pengaduan daring tidak pernah dijawab. Media lokal memberitakan bahwa kepala dinas yang baru dilantik adalah kerabat bupati tanpa proses seleksi terbuka, dan seorang kontraktor mengirim parcel mewah kepada pejabat pengadaan menjelang tender. Organisasi pemuda setempat meluncurkan gerakan "Teluk Damai Bersih" untuk memantau layanan publik.

Kasus ini fiktif dan disusun untuk keperluan ujian.

Soal:

1. Jelaskan perbedaan nilai dasar, instrumental, dan praksis Pancasila serta pengertian karakter bangsa. (15)
2. Analisis penguatan dan penyimpangan nilai Pancasila yang tampak dalam kasus menggunakan lima langkah analisis. (15)
3. Analisis unsur identitas nasional dan ekspresi kebangsaan lokal dalam festival tersebut. Apakah festival itu memperkuat integritas kebangsaan? Jelaskan. (28)
4. Evaluasi tata kelola Kabupaten Teluk Damai menggunakan minimal empat prinsip good governance dan dua asas AUPB, lalu rumuskan dua rekomendasi berbasis nilai Pancasila. (28)
5. Identifikasi bentuk perilaku koruptif dalam kasus beserta dasar normatifnya, dan jelaskan faktor penyebabnya dengan satu kerangka teori. (14)

Tabel 9.5 Pedoman penskoran UTS

No.	Unsur jawaban yang diharapkan
1	Tiga tingkatan nilai tepat (9); konsep karakter bangsa (6).
2	Lima langkah diterapkan (10); penilaian berbukti kasus (5).
3	Unsur identitas nasional tepat (10); analisis ekspresi kebangsaan lokal (10); penilaian integritas kebangsaan (8).
4	Empat prinsip dan dua asas dievaluasi dengan bukti (18); rekomendasi berbasis nilai (10).
5	Bentuk perilaku koruptif dan dasar normatif (8); faktor penyebab dengan teori (6).

■ 9.4 Ketentuan dan Kisi-Kisi UAS

UAS mengukur Sub-CPMK5–7 dan tidak berbentuk tes tertulis. Nilai UAS terdiri atas **esai ilmiah final** (60%) dan **pertanggungjawaban individu dalam sidang karakter** (40%). Esai final dikumpulkan

melalui LMS pada Minggu 15; sidang individu dilaksanakan bersamaan dengan sidang karakter atau pada Minggu 16 sesuai jadwal dosen.

Tabel 9.6 Kisi-kisi UAS

Bagian	Sub-CPMK	Yang dinilai	Skor
Esai ilmiah final	Sub-CPMK6	Kriteria Tabel 7.3: tesis dan argumen, sintesis lintas nilai, orisinalitas refleksi, rujukan, konsistensi ICHSA-N	60
Sidang individu: rasional rancangan	Sub-CPMK5	Menjelaskan komponen RAK yang menjadi tanggung jawabnya dan mekanisme akuntabilitasnya	20
Sidang individu: mempertahankan dan merevisi	Sub-CPMK7	Merespons pertanyaan secara jujur dan menunjukkan integrasi umpan balik ke dalam revisi	20
		Jumlah	100

■ 9.5 Rubrik Penilaian Komponen

Rubrik berikut melengkapi rubrik pada unit (Tabel 7.3, 7.4, dan 8.3) dan menggantikan rubrik RPS yang belum sesuai (5.1) atau masih kosong (5.3 dan 5.4).

Tabel 9.7 Rubrik Tugas Analisis Kasus (Unit 1–3)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Identifikasi nilai atau prinsip	Tepat dan lengkap sesuai kerangka unit	Tepat, kurang lengkap	Sebagian keliru	Keliru
Ketajaman analisis	Menilai kasus secara kritis dengan bukti	Memadai	Deskriptif	Tanpa analisis
Bukti dan sumber	Fakta bersumber dan terverifikasi	Sebagian besar bersumber	Sumber minim	Tanpa sumber
Argumentasi etis dan rekomendasi	Kuat, kontekstual, berbasis Pancasila	Memadai	Umum	Tidak ada

Kuis. Butir pilihan ganda dinilai dengan kunci. Butir uraian pendek dinilai dengan ketepatan konsep (60%) dan kelengkapan argumentasi (40%); kuis identifikasi kasus Unit 4 dinilai dengan ketepatan identifikasi (40%), kejelasan dasar normatif (30%), dan relevansi faktor penyebab (30%), sesuai RPS.

Tabel 9.8 Rubrik Laporan Komparatif Ekspresi Kebangsaan (Unit 2)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Keluasan cakupan kasus	≥3 konteks budaya KTI dengan kriteria sama	3 konteks, kriteria kurang seragam	2 konteks	1 konteks
Kedalaman analisis	Tantangan dan peluang dianalisis tajam	Memadai	Dangkal	Deskriptif
Ketepatan konsep	Konsep identitas dan integritas kebangsaan tepat	Sebagian besar tepat	Beberapa kekeliruan	Keliru
Kualitas argumen	Berbukti dan apresiatif-kritis	Memadai	Kurang bukti	Tidak berargumen

Tabel 9.9 Rubrik sidang individu (UAS)

Kriteria	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Penguasaan komponen yang menjadi tanggung jawabnya	Menjelaskan secara rinci dan logis	Memadai	Kurang rinci	Tidak menguasai
Pemahaman mekanisme akuntabilitas	Menjelaskan risiko dan pencegahannya dengan tepat	Memadai	Sebagian	Tidak memahami
Kejujuran dan respons terhadap pertanyaan	Jujur mengakui celah dan menawarkan perbaikan	Memadai	Defensif	Tidak mampu menjawab
Integrasi umpan balik	Menunjukkan revisi nyata dan beralasan	Revisi ada	Revisi minim	Tanpa revisi

Tabel 9.10 Rubrik holistik partisipasi dan sikap (ICHSA-N dan keselamatan)

Aspek	Sangat baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (60–69)	Kurang (< 60)
Partisipasi dan sikap	Konsisten jujur dan disiplin; aktif dan bernas; menghargai perbedaan daerah dan agama; adaptif terhadap kritik; peduli kepentingan komunitas; menjaga ketertiban dan keselamatan diri serta lingkungan belajar	Jujur, aktif, dan menghargai perbedaan; cukup adaptif	Kadang pasif; perlu diingatkan tentang atribusi, sikap, atau ketertiban	Tidak jujur, pasif, mendominasi, atau mengabaikan perbedaan

■ 9.6 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Pada akhir semester, dosen pengampu menganalisis rekap ketercapaian Sub-CPMK, CPMK, dan CPL dari SI-OBE, hasil kuesioner umpan balik (Lampiran 9), catatan reviewer tamu, dan catatan pelaksanaan pembelajaran. CPL yang dicapai kurang dari 75% mahasiswa pada ambang 70 menjadi prioritas perbaikan. Hasilnya dilaporkan dalam Portofolio Mata Kuliah dan menjadi dasar peninjauan RPS serta revisi modul sesuai siklus PPEPP.

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Akuntabilitas	Kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan sumber daya kepada publik.
Antikorupsi	Sikap dan upaya menolak serta mencegah segala bentuk korupsi.
AUPB	Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 30/2014.
BerAKHLAK	Nilai dasar ASN: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Bhinneka Tunggal Ika	Semboyan bangsa Indonesia: berbeda-beda tetapi tetap satu.
Etika pemerintahan	Nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku penyelenggara pemerintahan.
Good governance	Tata kelola yang baik yang melibatkan negara, swasta, dan masyarakat secara bertanggung jawab.
Gratifikasi	Pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya.
Identitas nasional	Ciri khas yang dimiliki suatu bangsa dan membedakannya dari bangsa lain.
Integritas kebangsaan	Konsistensi komitmen dan tindakan terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Karakter	Kesatuan pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral (Lickona).
Karakter bangsa	Kualitas perilaku kolektif yang khas berdasarkan nilai-nilai bersama bangsa.
Kearifan lokal	Nilai dan praktik budaya setempat yang menjadi pedoman hidup masyarakat.
Konflik kepentingan	Keadaan ketika kepentingan pribadi berpotensi memengaruhi keputusan dalam jabatan.
Korupsi	Penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Nepotisme	Perbuatan penyelenggara negara yang menguntungkan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat.
Nilai dasar, instrumental, praksis	Tingkatan nilai Pancasila: nilai tetap, penjabarannya dalam peraturan, dan wujudnya dalam perilaku.
Pancasila	Dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia.
Rencana Aksi Karakter (RAK)	Rancangan aksi berbasis nilai karakter bangsa untuk komunitas nyata, terdiri atas sembilan komponen.
Refleksi	Proses menengok kembali pengalaman untuk menarik makna dan menentukan tindakan.
SMART	Kriteria tujuan: spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.
Technopreneurship	Kewirausahaan berbasis teknologi, termasuk inovasi layanan publik yang beretika.
Transparansi	Keterbukaan informasi tentang kebijakan, anggaran, dan layanan kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Utama

- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila* (Edisi Revisi). Paradigma.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (Edisi Revisi). KPK RI.
- Lickona, T. (2009). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (Eds.). (2003). *Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society*. Hogrefe & Huber.

Pustaka Pendukung

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (t.t.). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. KPK RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Akuntabilitas*. LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Anti Korupsi*. LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Etika Publik*. LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Nasionalisme*. LAN RI.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan yang Baik*. Mandar Maju.
- Tim Penyusun. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbudristek RI.

Bacaan Pengayaan

- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

LAMPIRAN 1

Formulir Topik Proyek Akhir

Nama kelompok dan anggota (lintas prodi bila ada)	
Nama komunitas atau lembaga	
Lokasi (kabupaten/kota, provinsi KTI)	
Alasan pemilihan	
Persetujuan dosen	

LAMPIRAN 2

Lembar Peta Nilai

Sila Pancasila yang relevan	Fakta di komunitas	Kearifan lokal atau ekspresi kebangsaan	Modal karakter yang dapat dikembangkan

LAMPIRAN 3

Templat Laporan Analisis Kritis

Prinsip good governance	Indikator	Bukti dan sumber	Penilaian

Bentuk perilaku atau risiko koruptif	Dasar normatif	Faktor penyebab	Usulan pencegahan

LAMPIRAN 4

Templat Rencana Aksi Karakter (9 Komponen)

1. Profil komunitas dan masalah	
2. Peta nilai	
3. Tujuan SMART	
4. Sasaran dan pemangku kepentingan	
5. Strategi dan kegiatan	
6. Jadwal	
7. Anggaran estimatif	
8. Mekanisme akuntabilitas dan antikorupsi	
9. Indikator dan monitoring-evaluasi	

LAMPIRAN 5

Logbook Kontribusi Mingguan

Minggu	Kegiatan kelompok	Kontribusi tiap anggota	Paraf anggota

LAMPIRAN 6

Lembar Peer Review Esai

Penulis esai	
Peninjau	

Aspek	Catatan spesifik
Kejelasan tesis	
Kedalaman sintesis empat tema	
Koherensi argumen (klaim–bukti–penalaran)	
Kualitas refleksi (spesifik, tidak klise)	
Saran perbaikan utama	

LAMPIRAN 7

Lembar Penilaian Sejawat Presentasi

Kelompok atau penyaji	
Penilai	

Kriteria	Skor (1–4)	Catatan
Kejelasan struktur		
Kualitas argumen etis		
Relevansi konteks KTI		
Respons terhadap pertanyaan		
Kerja sama tim		

LAMPIRAN 8

Lembar Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan GenAI

Saya menyatakan bahwa karya berjudul merupakan hasil kerja saya sendiri, seluruh sumber telah dikutip sesuai kaidah, dan data tidak dikarang atau dimanipulasi. Penggunaan GenAI dinyatakan sebagai berikut.

(a) Alat GenAI	
(b) Bagian yang dibantu	
(c) Prompt	
(d) Modifikasi mandiri	
(e) Refleksi	

☐ Saya tidak menggunakan GenAI dalam karya ini.

Gorontalo, ...

(.....)

NIM

LAMPIRAN 9

Kuesioner Umpan Balik Mahasiswa terhadap Modul

Berilah tanda centang: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, 4 = sangat setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4
1	Capaian pembelajaran setiap unit dinyatakan dengan jelas.				
2	Uraian materi mudah dipahami.				
3	Studi kasus relevan dengan kehidupan berbangsa dan konteks KTI.				
4	Aktivitas pembelajaran membantu saya menghayati nilai, bukan sekadar menghafal.				
5	Latihan dan kunci jawaban membantu saya mengukur penguasaan.				
6	Rubrik penilaian jelas dan adil.				
7	Proyek Rencana Aksi Karakter bermakna bagi saya dan komunitas.				
8	Tampilan dan tata letak modul memudahkan belajar.				
9	Nilai ICHSA-N tercermin dalam kegiatan pembelajaran.				
10	Secara keseluruhan, modul ini bermanfaat bagi saya.				

Bagian modul yang paling membantu	
Bagian modul yang perlu diperbaiki	
Saran lain	